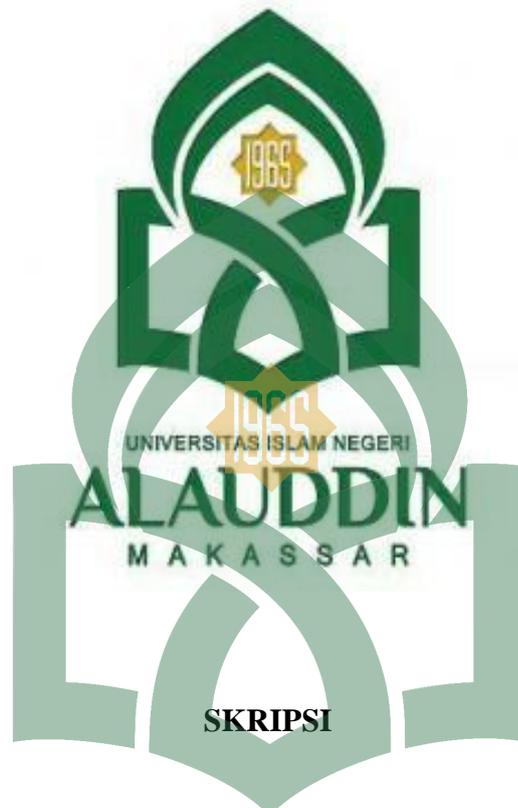


**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI  
PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI KABUPATEN  
GOWA**



Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar  
Sarjana Ekonomi (S.E) Pada Jurusan Ilmu Ekonomi  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
UIN Alauddin Makassar

Oleh

**AHMAD HARIS**  
**90300114014**

**JURUSAN ILMU EKONOMI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR  
2018**

## PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi berjudul “**Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Gowa**” yang disusun oleh **Ahmad Haris**, NIM: **90300114014**, Mahasiswa jurusan Ilmu Ekonomi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang Munaqasyah yang diselenggarakan pada tanggal 23 November 2018, bertepatan dengan 14 Rabi’ul Awal 1440 H, dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Jurusan Ilmu Ekonomi.

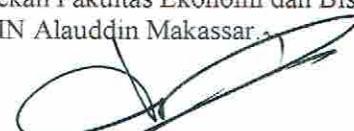
Samata-Gowa, 23 November 2018 M  
14 Rabi’ul Awal 1440 H

### DEWAN PENGUJI

Ketua : Prof. Dr. H. Muslimin Kara, M.Ag  
Sekertaris : Dr. H. Abd. Wahab, SE., M.Si.  
Penguji I : Prof. Dr. H. Ambo Asse, M. Ag.  
Penguji II : Dr. Syaharuddin, M.Si  
Pembimbing I : Dr. Urbanus Uma Leu, M.Ag.  
Pembimbing II : Ahmad Kafrawi Mahmud, S.Pd, M.Si



Diketahui Oleh:  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
UIN Alauddin Makassar

  
**Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag.**  
NIP. 19580221 198703 1 002

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : AHMAD HARIS

NIM : 90300114014

Tempat/Tgl.Lahir : Limbung, 05 Oktober 1997

Jurusan : Ilmu Ekonomi

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Alamat : Jl. Poros Krg. Manuju KM. 07 Bontomanai

Judul : Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Gowa

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar dan hasil karya sendiri. Jika kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, atau dibuat orang lain sebagian atau seluruhnya. Maka skripsi ini dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Samata, 02 November 2018

Penyusun

**Ahmad Haris**  
**90300114014**

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya yang tak terhingga sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktu sesuai dengan rencana. Dan tak lupa pula penulis kirimkan salam dan Shalawat kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat-sahabatnya

Skripsi dengan judul **“Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Gowa”** merupakan tugas akhir dalam menyelesaikan studi sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada program studi Ilmu Ekonomi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa memulai hingga mengakhiri proses pembuatan skripsi ini bukanlah hal seperti membalikkan telapak tangan. Ada banyak hambatan, tantangan dan cobaan yang dilalui. Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kesempurnaan sesuai yang diharapkan, baik dari segi teoritis, pembahasan maupun hasilnya. Hanya dengan ketekunan dan kerja keraslah yang menjadi penggerak sang penulis dalam menyelesaikan segala proses tersebut. Juga karena adanya berbagai bantuan berupa moril dan materil dari berbagai pihak yang telah membantu memudahkan langkah sang penulis. Meskipun demikian, penulis telah berusaha semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuan yang dimiliki.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari bahwa tidak bisa melakukan sesuatu tanpa bantuan dari pihak lain. Oleh karena itu melalui karya tulis ini, penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak yang telah membantu, terutama kepada:

1. Kedua Orang tuaku tercinta Habil Dg.Sarring dan Sahariah Dg.Lebang yang telah mempertaruhkan seluruh hidupnya untuk kesuksesan anaknya, yang telah melahirkan, membesarkan dan mendidik dengan sepenuh hati serta yang telah memberikan kasih sayang kepada penulis, terima kasih atas dukungan, motivasi dan doanya dalam penulisan skripsi ini. Dan juga ucapan terima kasih kepada sang kakak Muh.Hasyim dan sang adik Muh.Jasman yang juga banyak memberikan dukungan dan semangat dalam penulisan karya ini.
2. Bapak Prof. Dr. H. Musafir Pababbari, M.Si. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dan para Wakil Rektor serta seluruh jajarannya yang senangtiasa mencurahkan dedikasinya dalam rangka pengembangan mutu dan kualitas UIN Alauddin Makassar.
3. Bapak Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar
4. Bapak Dr. Siradjuddin, S.E, M.Si. selaku Ketua Jurusan Ilmu Ekonomi dan Bapak Hasbiullah, S.E, M.Si. selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar.

5. Bapak Dr. Urbanus Uma Leu, M.Ag selaku pembimbing I dan Bapak Ahmad Kafrawi Mahmud, S.Pd, M.Si selaku pembimbing II yang telah meluangkan waktu dari sela kesibukannya dengan jadwal rutinitas yang padat untuk memberikan bimbingan, petunjuk, serta arahan dalam penyusunan skripsi ini.
6. Bapak Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag. selaku penguji I dan Bapak Dr. Syaharuddin, M.Si. selaku penguji II yang telah menguji dengan seksama skripsi ini, sehingga skripsi ini menjadi sebuah karya tulis ilmiah yang sebagaimana mestinya.
7. Segenap dosen dan civitas akademika Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengikuti pendidikan, memberikan ilmu pengetahuan, dan pelayanan yang baik selama penulis melakukan studi.
8. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gowa yang telah memberikan banyak informasi serta data-data kepada penulis dalam penulisan skripsi ini.
9. Kawan-Kawan ILMU EKONOMI UIN Alauddin Makassar angkatan 2014, teman seperjuangan yang selama ini memberikan banyak motivasi. Terima kasih atas dukungan dan motivasi kalian, perkenalan dengan kalian, serta berjuang bersama kalian, hal tersebut memberikan banyak pelajaran berharga kepada penulis.
10. Untuk teman-teman KKN Angkatan Ke 58 Dusun Cindakko, Desa Bontosomba, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Maros (Rizal, Nabhan, Wawan, Fuad, Usman, Dedy, Ma'ruf, Sakti dan Iwan) terima kasih atas

dukungan dan motivasi kalian, hidup bersama dan bekerja bersama, hal tersebut memberikan pelajaran kepada penulis bagaimana arti dari tanggung jawab yang sebenarnya.

Ucapan terima kasih dan permohonan maaf penulis juga kepada keluarga, teman-teman, serta sahabat-sahabat yang tidak sempat disebutkan namanya satu persatu. Yang telah banyak memberikan motivasi, dukungan serta bantuan moral dan moril dalam proses penyelesaian skripsi ini.

Semoga skripsi yang penulis persembahkan ini dapat bermanfaat. Akhirnya, dengan segala kerendahan hati, penulis memohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala kekurangan dan keterbatasan dalam penulisan skripsi ini. Saran dan kritik yang sifatnya membangun tentunya penulis harapkan untuk menyempurnakan skripsi ini.

Gowa, 02 November 2018

Penulis,

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
M A K A S S A R

**Ahmad Haris**  
**90300114014**

## DAFTAR ISI

<b>SAMPUL</b> .....	<b>i</b>
<b>PENGESAHAN SKRIPSI</b> .....	<b>ii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI</b> .....	<b>iii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>iv</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>viii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xi</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Definisi Operasional.....	9
D. Tujuan Penelitian.....	10
E. Manfaat Penelitian.....	11
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>12</b>
A. Pajak.....	12
B. Pajak Daerah.....	20
C. Pajak Bumi dan Bangunan.....	26
D. Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Penerimaan PBB.....	33
E. Penelitian Terdahulu.....	36
F. Kerangka Penelitian.....	42
G. Hipotesis Penelitian.....	44
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	<b>45</b>
A. Jenis Penelitian.....	45
B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	45

C. Jenis dan Sumber Data .....	46
D. Metode Pengumpulan Data .....	46
E. Metode Analisis Data.....	47
F. Uji Hipotesis .....	57
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>62</b>
A. Gambaran Umum Kabupaten Gowa .....	62
B. Gambaran Umum Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gowa .....	67
C. Perkembangan Variabel Penelitian .....	71
D. Hasil Estimasi Model Penelitian .....	76
E. Pembahasan Hasil Penelitian .....	82
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>86</b>
A. Kesimpulan .....	86
B. Saran.....	87
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>88</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>92</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>111</b>



## DAFTAR TABEL

NO	Teks	Halaman
Tabel 1.1	Laporan Target dan Realisasi Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Gowa Tahun 2013 – 2017.....	5
Tabel 2.1	Matriks Penelitian Terdahulu.....	37
Tabel 4.1	Jumlah Kecamatan di Kabupaten Gowa, dan Jarak dari Ibukota Kecamatan ke Ibukota Kabupaten di Kabupaten Gowa Tahun 2017 .....	64
Tabel 4.2	Jumlah Penduduk Perkecamatan di Kabupaten Gowa tahun 2017.....	65
Tabel 4.3	Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Gowa tahun 2016-2017.....	66
Tabel 4.4	Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan perkecamatan di Kabupaten Gowa.....	71
Tabel 4.5	Data Luas Bangunan Perkecamatan di Kabupaten Gowa.....	72
Tabel 4.6	Data Jumlah Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) perkecamatan di Kabupaten Gowa.....	74
Tabel 4.7	Data Jumlah Objek Pajak Bumi dan Bangunan perkecamatan di Kabupaten Gowa .....	75
Tabel 4.8	Uji Hausman Hasil Estimasi Model.....	77
Tabel 4.9	Hasil Estimasi Model Random Effect.....	78
Tabel 4.10	Nilai Koefisien Derterminasi (R <sup>2</sup> ).....	80
Tabel 4.11	Hasil Uji Simultan.....	81
Tabel 4.12	Hasil Uji Statistik (Uji T).....	81

## DAFTAR GAMBAR

NO	Teks	Halaman
Gambar 2.1	Kerangka Penelitian .....	43
Gambar 4.1	Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gowa.....	70



## ABSTRAK

**Nama** : Ahmad Haris

**Nim** : 90300114014

**Jurusan** : Ilmu Ekonomi

**Fakultas** : Ekonomi dan Bisnis Islam

**Judul** : Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Gowa

---

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis seberapa besar pengaruh variabel independen dalam hal ini luas bangunan, jumlah Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) dan objek pajak terhadap tingkat penerimaan pajak bumi dan bangunan di Kabupaten Gowa.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang bersumber dari Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gowa. Metode analisis data yang digunakan analisis regresi data panel dengan teknik *pooled* EGLS.

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa variabel luas bangunan berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak bumi dan bangunan dengan nilai probabilitas  $0.0173 < 0,05$ . Variabel Jumlah SPPT berpengaruh secara signifikan dengan nilai probabilitas  $0.0102 < 0,05$ , variabel objek pajak berpengaruh signifikan dengan nilai probabilitas  $0.0000 < 0,05$ . Koefisien dererminan ( $R^2$ ) sebesar 0.876714 berarti variasi variabel bebas (luas bangunan, jumlah SPPT, dan objek pajak) menjelaskan variasi variabel terikat (penerimaan pajak bumi dan bangunan) sebesar 87% sedangkan 13% dijelaskan oleh variabel lain diluar penelitian.

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan rujukan bagi penelitian selanjutnya dan pertimbangan bagi pemerintah Kabupaten Gowa khususnya pihak pengelola pajak Bumi dan Bangunan agar memaksimalkan pemungutan sehingga realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan bisa tercapai dengan maksimal.

**Kata Kunci** : Luas Bangunan, Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT), Objek Pajak, Pajak Bumi dan Bangunan.

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. *Latar Belakang***

Indonesia merupakan salah satu negara yang menjunjung tinggi nilai-nilai yang ada dalam ideologi Pancasila dan UUD 1945. Perwujudan kewajiban kenegaraan dan persatuan dalam gotong royong nasional merupakan hal yang penting dalam pelaksanaan pembangunan nasional. Pembangunan nasional adalah proses yang berkesinambungan yang secara terus-menerus dilakukan dimana tujuannya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat baik secara materil maupun secara spiritual. Untuk dapat melaksanakan hal tersebut maka perlu diperhatikan masalah-masalah pembiayaan daerah.

Salah satu usaha untuk melanjutkan kemandirian suatu bangsa dan negara dalam proses pembangunan adalah dengan menggali sumber dana yang berasal dari dalam negeri salah satunya adalah pajak. Jadi, suatu daerah diharapkan dapat memanfaatkan segala potensi yang ada pada masing-masing daerah, sehingga pelaksanaan pembangunan tersebut diserahkan langsung pada tiap-tiap daerah untuk mengatur rumah tangganya sendiri dan urusan yang ada di dalamnya.

Era otonomi daerah yang secara resmi diberlakukan di Indonesia sejak 1 Januari 2001 menghendaki daerah untuk berkreasi dalam mencari sumber penerimaan yang dapat membiayai pengeluaran pemerintahan daerah dalam rangka

menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan.<sup>1</sup> Oleh karena itu, pemerintah daerah berusaha semaksimal mungkin untuk meningkatkan pendapatan sehingga dapat menunjang pelaksanaan pembangunan. Adapun sumber pendapatan pemerintah, yaitu berasal dari penerimaan pajak, penerimaan negara bukan pajak serta penerimaan hibah dari dalam negeri dan luar negeri.

Pajak merupakan penerimaan negara yang sangat besar kontribusinya dalam membiayai kebutuhan belanja negara dan pembangunan nasional. Sumber dana bagi pemerintah yang digunakan untuk membiayai segala pengeluaran-pengeluaran umum yang bermanfaat bagi masyarakat termasuk untuk pembangunan. Untuk itu, pemerintah selalu berupaya untuk terus meningkatkan pendapatan melalui pajak. Selain itu, peran dan tanggung jawab masyarakat dalam keikutsertaannya dalam pembangunan sangat diharapkan. Salah satu dari peran masyarakat adalah sebagai wajib pajak yang baik, yang secara sadar dan bertanggung jawab melaksanakan kewajibannya untuk membayar pajak baik pajak pusat maupun pajak daerah.<sup>2</sup>

Dalam Q.S At- Taubah/09:103. Allah SWT berfirman :

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ  
 وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

<sup>1</sup>Marihot “*Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*” (Cet. 3; Jakarta: Rajawali Pers, 2013).

<sup>2</sup>Sufyan Amirullah, “ Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sulawesi Barat”, *Skripsi* (Makasar: Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Hasanuddin Makassar, 2016), h. 1-2.

Terjemahnya :

*“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui”.*<sup>3</sup>

Maksud dari ayat diatas menjelaskan bahwa zakat itu membersihkan mereka dari kekikiran dan cinta yang berlebih-lebihan kepada harta benda, zakat itu menyuburkan sifat-sifat kebaikan dalam hati mereka dan memperkembangkan harta benda mereka. Jadi, masyarakat diwajibkan untuk membayar pajak yang dipungut oleh pemerintah berdasarkan Undang-undang.

Selama ini pungutan daerah yang berupa pajak dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 dan sekarang telah disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Sesuai dengan Undang-Undang tersebut, daerah diberi kewenangan untuk memungut 16 (enam belas) jenis pajak, yaitu 5 (lima) Pajak Provinsi dan 11 (sebelas) jenis pajak Kabupaten/Kota.<sup>4</sup> Jenis pajak provinsi meliputi : Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan dan Pajak Rokok. Sedangkan yang termasuk dalam Pajak Kabupaten/Kota adalah: Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame,

---

<sup>3</sup> Departemen Agama RI. Al-Quran dan Terjemahannya Q.S Al-Qashash, h. 204.

<sup>4</sup>Alviana Anugrah Natsir, “Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Maros”, *Skripsi* (Makassar: Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Hasanuddin Makassar, 2016), h. 2-3.

Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Kabupaten Gowa merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan yang memiliki banyak potensi yang dapat memberikan kontribusi untuk meningkatkan sumber penerimaan daerah. Salah satunya Pajak Bumi dan Bangunan. Pajak Bumi dan Bangunan merupakan salah satu sumber penerimaan daerah, seiring dengan peningkatan pembiayaan pembangunan ekonomi diharapkan realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan dari tahun ke tahun meningkat pula, sehingga kontribusinya terhadap pendapatan asli daerah pun juga meningkat.<sup>5</sup>

Kontribusi pajak bumi dan bangunan tidaklah besar dalam struktur penerimaan negara, tetapi keberadaannya sangat berarti dan tidak dapat dihilangkan, namun demikian Pajak Bumi dan Bangunan merupakan pajak yang tidak sulit dalam pengadministrasiannya karena dalam pembayarannya sudah dikelola oleh RT/RW di lingkungan masing-masing wajib pajak tinggal dan efisiensi pemungutannya rendah karena objek pajaknya cukup banyak.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup>Insukindro “Peranan dan Pengelolaan Keuangan Daerah dalam Usaha Peningkatan Pendapatan Asli Daerah, (Yogyakarta: Laporan Penelitian Kursus Keuangan Daerah FE-UGM, 1994), h. 1.

<sup>6</sup>Muhammad Ash. Shiddiq “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kesadaran Wajib Pajak dalam Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Tangerang selatan”, *Skripsi* ( Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2011), h. 7-8.

Dalam Q.S Al-Qashash/28:84. Allah SWT berfirman :

مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِّنْهَا <sup>ط</sup> وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا تُجْرَىٰ عَلَيْهِمُ الْعَمَلُ الَّذِينَ  
السَّيِّئَاتِ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

Terjemahnya:

*“Barangsiapa yang datang dengan (membawa) kebaikan. Maka baginya (pahala) yang lebih baik daripada kebaikannya itu; dan barangsiapa yang datang dengan (membawa) kejahatan, maka tidaklah diberi pembalasan kepada orang-orang yang telah mengerjakan kejahatan itu, melainkan (seimbang) dengan apa yang dahulu mereka kerjakan”.*<sup>7</sup>

Ayat diatas menekankan sebuah kinerja yang baik akan menghasilkan yang baik pula, penilaian kinerja adalah untuk menentukan faktor-faktor yang dipertimbangkan meliputi derajat pencapaian tujuan, cara-cara pengukuran item-item dan standar yang digunakan.<sup>8</sup>

Pajak Bumi dan Bangunan mempunyai dampak yang lebih luas sebab hasil penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan dikembalikan untuk pembangunan daerah yang bersangkutan, bagian Pajak Bumi dan Bangunan yang diterima daerah merupakan salah satu sumber penerimaan yang penting bagi daerah dalam era otonomi sekarang ini.

<sup>7</sup>Departemen Agama RI. Al-Quran dan Terjemahannya Q.S Al-Qashash, h. 316.

<sup>8</sup>Islahuzzaman, “Dasar-Dasar Akuntansi”, (Cet. 7, Jakarta: Bumi Aksara, 2011), h. 25

Di bawah ini disajikan tabel Target dan Realiasi Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Gowa tahun 2013-2017.

**Tabel 1.1**  
**Laporan Target dan Realisasi Pajak Bumi dan Bangunan pada Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Gowa Tahun 2013-2017**

TAHUN	TARGET	REALISASI	SELISIH
2013	8.000.000.000	8.110.775.690	110.775.690
2014	11.240.635.421	12.974.290.433	1.733.655.012
2015	11.240.635.421	10.953.096.977	-287.538.444
2016	11.240.635.421	11.325.966.335	85.330.914
2017	12.240.635.421	12.163.009.512	-77.625909

*Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kab.Gowa (Data diolah)*

Tabel 1.1 di atas menunjukkan bahwa realisasi Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Gowa selama tahun 2013-2017 mengalami fluktuasi. Hal ini dapat dilihat pada tahun 2013-2014 mengalami peningkatan sebanyak Rp. 110.775.690 dan Rp. 1.733.655.012 dari target yang telah ditentukan. Namun, mengalami penurunan pada tahun 2015 dan tahun 2017 sebanyak Rp. 287.538.444 dan Rp. 77.625909 dari target yang telah ditentukan. Hal ini menunjukkan kurang maksimalnya pencapaian realisasi Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Gowa. Oleh karena itu, pemerintah daerah harus memperhatikan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan sehingga penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan tersebut bisa mengalami peningkatan realisasi setiap tahunnya sesuai dengan target yang telah ditentukan.

Menurut Witiya Tri Handayani dalam penelitiannya mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Jebres Kota Surakarta, hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan adalah (1) SPPT tidak tersampaikan kepada wajib pajak, (2) Wajib pajak lupa membayar Pajak Bumi dan Bangunan karena faktor kesibukan, (3) Isu pajak, (4) tingkat pengetahuan, (5) kesadaran rendah dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan, (6) topografi wilayah, (7) data belum dientry, dan (8) tingkat pendapatan wajib pajak.<sup>9</sup>

Menurut Hadi Sasana dalam penelitiannya mengenai analisis faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Studi kasus di Kabupaten Banyumas, berdasarkan hasil penelitian tersebut disimpulkan bahwa variabel PDRB perkapita, jumlah wajib pajak, inflasi, jumlah luas lahan, jumlah bangunan berpengaruh positif terhadap penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan. Variabel PDRB perkapita berpengaruh positif dengan koefisien 0,532; jumlah wajib pajak dengan koefisien 2,231; inflasi dengan tingkat koefisien 0,003; jumlah luas lahan dengan koefisien 3,085 dan jumlah bangunan dengan koefisien 3,599. Sedangkan variabel krisis moneter berpengaruh negatif terhadap penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup>Witiya Tri Handayani, "Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan pada Kecamatan Jebres Kota Surakarta". *Jurnal Penelitian UNS*, Vol 2, No.3. 2014, (Diakses 17 Juli 2018).

<sup>10</sup>Hadi Sasana, "Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Studi kasus di Kabupaten Banyumas", *jurnal Dinamika Pemabangunan*, vol. 2 No.1, 2005, (Diakses 17 Juli 2018).

Menurut Septiany dalam penelitiannya yang berjudul Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) pada KKP Pratama di Sleman menunjukkan bahwa jumlah objek pajak, luas tanah, luas bangunan, jumlah SPPT, pengurangan, dan tunggakan berpengaruh serentak terhadap penerimaan PBB.

Kabupaten Gowa sebagaimana kita ketahui adalah salah satu wilayah dengan luas 1.883,32 Km dengan wilayah terbagai menjadi dua bagian yaitu dataran tinggi dan dataran rendah dengan ketinggian antara 10-2800 meter diatas permukaan laut. Kabupaten Gowa memiliki 18 kecamatan dan 45 kelurahan serta 112 desa yang secara struktur administrasi, Kabupaten Gowa masuk wilayah strategis pembangunan daerah.

Bukan itu saja, Kabupaten Gowa memiliki beberapa bahan tambang, Pertanian, peternakan, serta beberapa lokasi wisata yang mendukung pendapatan daerah. Dari segi pajak pembangunan daerah tentunya keseluruhan aspek baik dari aspek luas wilayah, pembangunan daerah, proyek investasi, pertanian, serta objek wisata sangat mendukung bagi pembangunan daerah lewat Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

Namun fakta yang ada, berdasarkan data awal dari Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gowa dari tahun 2013 hingga tahun 2017 terjadi penurunan terhadap Pajak Bumi dan Bangunan pada tahun 2015. Tentunya faktor yang mempengaruhi penurunan itu pasti ada. Ketika merujuk kepada luas bangunan, jumlah Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) serta objek pajak yang berada di Kabupaten Gowa sendiri maka harusnya PBB berperan penting dalam pembangunan daerah.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka penulis tertarik melakukan penelitian mengenai “**Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Gowa**”

### ***B. Rumusan Masalah***

Berdasarkan pemaparan latar belakang diatas, maka dirumuskan masalah sebagai berikut :

1. Apakah luas bangunan berpengaruh terhadap penerimaan pajak bumi dan bangunan di Kabupaten Gowa ?
2. Apakah jumlah surat pemberitahuan pajak terutang (SPPT) berpengaruh terhadap penerimaan pajak bumi dan bangunan di Kabupaten Gowa?
3. Apakah objek pajak bumi dan bangunan berpengaruh terhadap penerimaan pajak bumi dan bangunan di Kabupaten Gowa?

### ***C. Definisi Operasional***

Dalam penelitian ini menggunakan dua variabel operasional yaitu variabel independen dan variabel dependen. Variabel independen adalah variabel yang mempengaruhi variabel lain, sedangkan variabel dependen adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel lain. Yang dimana variabel independen dalam penelitian ini adalah luas bangunan diberi simbol ( $X_1$ ), Jumlah Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) diberi simbol ( $X_2$ ), dan Objek Pajak Bumi dan Bangunan diberi simbol ( $X_3$ ), sedangkan variabel dependen dalam penelitian ini adalah Pajak Bumi

dan Bangunan yang diberi simbol (Y). masing-masing variabel penelitian tersebut diuraikan sebagai berikut :

1. Luas Bangunan ( $X_1$ ) , merupakan luas daripada konstruksi teknik yang ditanam atau diletakkan secara tetap pada tanah, yang diperuntukkan sebagai tempat tinggal atau tempat berusaha atau tempat yang dapat diusahakan.
2. Jumlah Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) ( $X_2$ ), merupakan jumlah surat yang digunakan oleh pemerintah untuk memberitahukan kepada wajib pajak tentang besarnya jumlah pajak terutang yang harus dibayar wajib pajak.
3. Objek Pajak Bumi dan Bangunan ( $X_3$ ), merupakan seluruh permukaan bumi serta konstruksi bangunan yang berada dalam suatu wilayah yang harus dibayarkan oleh wajib pajak kepada kantor pelayanan pajak daerah.
4. Pajak Bumi dan Bangunan (Y) adalah pajak yang dikenakan atas bumi dan bangunan. Subjek pajak dalam PBB adalah orang atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi atau memperoleh manfaat atas bumi, memiliki, menguasai atau memperoleh manfaat atas bangunan.

#### ***D. Tujuan Penelitian***

Berdasarkan uraian diatas, maka yang menjadi tujuan penelitian adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengaruh luas bangunan terhadap penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Gowa.

2. Untuk mengetahui pengaruh jumlah surat pemberitahuan pajak terutang (SPPT) terhadap penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Gowa.
3. Untuk mengetahui pengaruh jumlah objek pajak bumi dan bangunan terhadap penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Gowa.

#### ***E. Manfaat Penelitian***

Manfaat dari penelitian ini terbagi atas dua manfaat, yaitu :

##### **1. Manfaat akademis**

Penelitian ini dapat dijadikan sumbangan pemikiran atau studi banding bagi mahasiswa atau pihak yang melakukan penelitian yang sejenis. Disamping itu, guna meningkatkan keterampilan, memperluas wawasan yang akan membentuk mental mahasiswa sebagai bekal memasuki lapangan kerja.

Sebagai syarat untuk mendapatkan gelar sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, dan juga menambah pengetahuan dan pengalaman penulis agar dapat menambah dan mengembangkan ilmu yang diperoleh selama mengikuti perkuliahan.

##### **2. Manfaat Praktis**

Penelitian ini dapat memberikan manfaat dan menjadi masukan bagi pemerintah daerah Kabupaten Gowa terutama pada aparat Badan Pendapatan Daerah serta Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Gowa untuk meningkatkan pemungutan serta pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. *Pajak*

##### 1. Pengertian Pajak

Pajak merupakan perikatan yang timbul karena undang-undang yang mewajibkan seseorang, yang memenuhi syarat yang telah ditentukan undang-undang untuk membayar kepada kas negara yang dapat dipaksakan tanpa mendapat imbalan, yang secara langsung dapat di tunjuk, yang digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara (rutin dan pembangunan) dan yang digunakan sebagai alat (pendorong dan penghambat) untuk mencapai tujuan di bidang keuangan.

Pernyataan mengenai hak negara memungut pajak terhadap rakyat beserta dasar keadilannya merupakan pertanyaan yang mendasar, mengingat setiap pungutan pajak dengan nama apapun yang dilakukan oleh negara akan mengurangi kemampuan ekonomi seseorang, membatasi daya beli dan dapat mempengaruhi kesejahteraan hidup seseorang.

Definisi pajak yang dikemukakan oleh para ahli diantaranya adalah :

- a. Menurut Prof. Dr. P. J. A. Andriani, pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

- b. Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro SH, Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbale (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.
- c. Sedangkan menurut Ray M, Sommerfeld, dkk, mengemukakan bahwa pajak adalah suatu pengelihan sumber dari sektor swasta ke sektor pemerintah, bukan akibat pelanggaran hukum, namun wajib dilaksanakan, berdasarkan ketentuan yang ditetapkan lebih dahulu, tanpa mendapat imbalan yang langsung dan proporsional, agar pemerintah dapat melaksanakan tugas-tugasnya untuk menjalankan pemerintahan.<sup>1</sup>

## 2. Ciri Pajak

Dari berbagai definisi yang diberikan terhadap pajak baik pengertian secara ekonomis (pajak sebagai pengalihan sumber dari sektor swasta ke sektor pemerintah) atau pengertian secara yuridis (pajak adalah iuran yang dapat dipaksakan) dapat ditarik kesimpulan tentang ciri-ciri yang terdapat pada pengertian pajak antara lain sebagai berikut:

- a. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang. Asas ini sesuai dengan perubahan ketiga UUD 1945 pasal 23A yang menyatakan “pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dalam undang-undang”.
- b. Tidak mendapatkan jasa timbal balik (kontraprestasi perseorangan) yang dapat ditunjukkan secara langsung. Misalnya, orang yang taat membayar

---

<sup>1</sup>Jamaluddin “*Pengantar Perpajakan* “, (Alauddin University Press: cetakan 1, 2011) , h.

pajak kendaraan bermotor akan melalui jalan yang sama kualitasnya dengan orang yang tidak membayar pajak kendaraan bermotor.

- c. Pemungutan pajak diperuntukkan bagi keperluan pembiayaan umum pemerintah dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan, baik rutin maupun pembangunan.
- d. Pemungutan pajak dapat dipaksakan. Pajak dapat dipaksakan apabila wajib pajak tidak memenuhi kewajiban perpajakan dan dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.
- e. Selain fungsi *budgetair* (anggaran) yaitu fungsi mengisi kas negara/anggaran negara yang diperlukan untuk menutup pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, pajak juga berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan negara dalam lapangan ekonomi dan sosial (fungsi mengatur/regulatif).<sup>2</sup>

### 3. Fungsi Pajak

Pajak mempunyai peranan penting dalam kehidupan bernegara, khususnya didalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran pembangunan. Berdasarkan hal diatas maka pajak mempunyai beberapa fungsi, yaitu :

#### a. Fungsi Anggaran (*Budgetair*)

Sebagai sumber pendapatan negara, pajak berfungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. Untuk menjalankan tugas-tugas rutin

---

<sup>2</sup>Dina Anggraeni “Analisis Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (Studi Empiris pada Propinsi Bengkulu)”, *Skripsi* (Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2010), h. 12-13.

negara dan melaksanakan pembangunan, negara membutuhkan biaya.

Biaya ini dapat diperoleh dari penerimaan pajak.

b. Fungsi Mengatur (*Regulerend*)

Pemerintah bisa mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijaksanaan pajak, dengan fungsi mengatur pajak bisa digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan.

c. Fungsi Stabilitas

Dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan.

d. Fungsi Redistribusi Pendapatan

Pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga untuk membiayai pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.<sup>3</sup>

#### 4. Syarat Pemungutan Pajak

Agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat sebagai berikut :

a. Pemungutan pajak harus adil (Syarat Keadilan)

Sesuai dengan tujuan hukum , yakni mencapai keadilan. Adil dalam perundang-undangan diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing.

---

<sup>3</sup>Jamaluddin “*Pengantar Perpajakan*“, h. 5.

Sedang adil dalam pelaksanaannya yakni dengan memberikan hak bagi wajib pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada Majelis Pertimbangan pajak.

b. Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang (Syarat Yuridis)

Di Indonesia, pajak diatur dalam UUD 1945 Pasal 23 Ayat 2. Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan baik bagi negara maupun warganya.

c. Tidak mengganggu perekonomian (Syarat Ekonomis)

Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat.

d. Pemungutan Pajak harus efisien (Syarat Finansil)

Sesuai fungsi budgetair, biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan sehingga lebih rendah dari hasil pemungutannya.

e. Sistem pemungutan pajak harus sederhana

Sistem pemungutan pajak harus sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.<sup>4</sup>

## 5. Teori Pemungutan Pajak

Terdapat beberapa teori yang menjelaskan atau memberikan justifikasi pemberian hak kepada negara untuk memungut pajak. Teori-teori tersebut antara lain adalah :

---

<sup>4</sup>Mardiasmo “ *Perpajakan*”, Edisi Revisi 2006 (Yogyakarta: Penerbit Andi Ofset, 2006), h. 2.

a. Teori Asuransi

Negara melindungi kemaslahatan jiwa, harta benda, dan hak-hak rakyatnya. Oleh karena itu rakyat harus membayar pajak yang diibaratkan sebagai suatu premi asuransi karena memperoleh jaminan perlindungan tersebut.

b. Teori Kepentingan

Pembagian beban pajak kepada rakyat didasarkan pada kepentingan (misalnya perlindungan) masing-masing orang. Semakin besar kepentingan seseorang terhadap negara, makin tinggi pajak yang harus dibayar.

c. Teori Daya Pikul

Beban pajak untuk semua orang harus sama beratnya, artinya pajak harus dibayar sesuai dengan daya pikul masing-masing orang. Untuk mengukur daya pikul dapat digunakan 2 pendekatan, yaitu :

- 1) Unsur Objektif, yaitu melihat besarnya penghasilan atau kekayaan yang dimiliki oleh seseorang.
- 2) Unsur subjektif, yaitu dengan memperhatikan besarnya kebutuhan materil yang harus dipenuhi.

d. Teori Bakti

Dasar keadilan pemungutan pajak terletak pada hubungan rakyat dengan negaranya. Sebagai warga negara yang berbakti, rakyat harus selalu menyadari bahwa pembayaran pajak adalah sebagai suatu kewajiban.

e. Teori Asas Daya Beli

Dasar keadilan terletak pada akibat pemungutan pajak, maksudnya memungut pajak berarti menarik daya beli dari rumah tangga masyarakat

untuk rumah tangga negara. Selanjutnya negara akan menyalurkannya kembali ke masyarakat dalam bentuk pemeliharaan kesejahteraan masyarakat, dengan demikian kepentingan seluruh masyarakat lebih diutamakan.<sup>5</sup>

## 6. Pengelompokan Pajak

### a. Menurut Golongannya

- 1) Pajak Langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain, misalnya pajak penghasilan.
- 2) Pajak Tidak Langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain, misalnya Pajak Pertambahan Nilai.

### b. Menurut Sifatnya

- 1) Pajak Subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contohnya pajak penghasilan.
- 2) Pajak Objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan dari wajib pajak.

### c. Menurut Lembaga Pemungutannya

- 1) Pajak Pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara.

---

<sup>5</sup>Mardiasmo “*Perpajakan*”, hlm. 3.

- 2) Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.<sup>6</sup>

## 7. Jenis Pajak

Di tinjau dari segi Lembaga Pemungutan Pajak dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu :

- a. Pajak Pusat, sering disebut juga Pajak Pusat yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat yang terdiri dari:

- 1) Pajak Penghasilan, diatur dalam UU No.7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan yang diubah terakhir kali dengan UU No.36 Tahun 2008 dan Revisi 2009.
- 2) Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah diatur dalam UU No.8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang diubah terakhir kali dengan UU No.42 Tahun 2009.
- 3) Bea Materai UU No.13 Tahun 1985 tentang Bea Materai.

- b. Pajak Daerah, sesuai UU 28/2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, berikut jenis-jenis pajak daerah :

- 1) Jenis Pajak Provinsi terdiri dari :
  - a) Pajak Kendaraan Bermotor;
  - b) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
  - c) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
  - d) Pajak Air Permukaan; dan

---

<sup>6</sup>Mardiasmo “ *Perpajakan*”, hlm. 5.

- e) Pajak Rokok.
- 2) Jenis Pajak Kabupaten/Kota terdiri atas :
- a) Pajak Hotel;
  - b) Pajak Restoran;
  - c) Pajak Hiburan;
  - d) Pajak Reklame;
  - e) Pajak Penerangan Jalan;
  - f) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
  - g) Pajak Parkir;
  - h) Pajak Air Tanah;
  - i) Pajak Sarang Burung Walet;
  - j) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
  - k) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.<sup>7</sup>

## **B. Pajak Daerah**

### **1. Pengertian Pajak Daerah**

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang kemudian direvisi dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 mendefinisikan pajak daerah sebagai berikut: “Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang,

---

<sup>7</sup>Jamaluddin “*Pengantar Perpajakan*“, h. 8.

yang tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.<sup>8</sup>

Sunarto menyebutkan bahwa “pajak daerah merupakan pajak yang dikelola oleh pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota yang berguna untuk menunjang penerimaan pendapatan asli daerah dan hasil penerimaan tersebut masuk dalam APBD”.<sup>9</sup> Sedangkan Mardiasmo mendefinisikan pajak daerah sebagai berikut: “Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.<sup>10</sup>

Dari pengertian diatas, maka dapat disimpulkan pajak daerah mempunyai ciri-ciri:

- a. Pajak daerah yang berasal dari pajak negara yang diserahkan kepada daerah.
- b. Penyerahannya berdasarkan undang-undang.
- c. Pajak daerah dipungut oleh daerah berdasarkan Undang-undang dan peraturan hukum.
- d. Hasil pungutan pajak daerah dipergunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah.

---

<sup>8</sup>Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah.

<sup>9</sup>Sunarto “*Pajak dan Retribusi Daerah*”, (Yogyakarta: AMUS dan Citra Pustaka, 2005)

<sup>10</sup>Mardiasmo “*Perpajakan*”, Edisi Revisi 2011 (Yogyakarta: Penerbit Andi Ofset, 2011), h. 12.

## 2. Jenis-Jenis Pajak Daerah

Menurut Mardiasmo Pajak Daerah dibagi menjadi 2 bagian, yaitu sebagai berikut:

a. Pajak Provinsi, terdiri atas:

- 1) Pajak Kendaraan Bermotor;
- 2) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
- 3) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
- 4) Pajak Air Permukaan;
- 5) Pajak Rokok;

b. Pajak Kabupaten/Kota, terdiri atas:

- 1) Pajak Hotel;
- 2) Pajak Restoran;
- 3) Pajak Hiburan;
- 4) Pajak Reklame;
- 5) Pajak Penerangan Jalan;
- 6) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
- 7) Pajak Parkir;
- 8) Pajak Air Tanah;
- 9) Pajak Sarang Burung Walet;
- 10) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
- 11) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup>Mardiasmo “*Perpajakan*”, Edisi terbaru 2016 (Yogyakarta: Penerbit Andi Ofset, 2006), h. 15.

### 3. Tarif Pajak Daerah

Tarif pajak daerah yang dipungut oleh pemerintah daerah telah diatur dalam UU No. 28 Tahun 2009 yang ditetapkan dengan pembatasan tarif paling tinggi berbeda untuk setiap jenis pajak, yaitu :

- a. Pajak kendaraan bermotor ditetapkan paling tinggi 10%;
- b. Bea balik nama kendaraan bermotor ditetapkan paling tinggi 20%;
- c. Pajak bahan bakar kendaraan bermotor ditetapkan paling tinggi 10%;
- d. Pajak air permukaan ditetapkan paling tinggi 10%;
- e. Pajak rokok ditetapkan paling tinggi sebesar 10% dari cuaki rokok;
- f. Pajak hotel ditetapkan paling tinggi 10%;
- g. Pajak restoran ditetapkan paling tinggi 10%;
- h. Pajak hiburan ditetapkan paling tinggi 35%;
- i. Pajak reklame ditetapkan paling tinggi 25%;
- j. Pajak penerangan jalan ditetapkan paling tinggi 10%;
- k. Pajak mineral bukan logam dan batuan ditetapkan paling tinggi 25%;
- l. Pajak parkir ditetapkan paling tinggi 30%;
- m. Pajak air tanah ditetapkan paling tinggi 20%;
- n. Pajak sarang burung walis ditetapkan paling tinggi 10%;
- o. Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan ditetapkan paling tinggi sebesar 0,3%;

- p. Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan ditetapkan paling tinggi sebesar 5% .<sup>12</sup>

#### 4. Kendala Pemungutan Pajak Daerah

Seringkali petugas pajak daerah menjumpai kendala yang melemahkan dalam pemungutan pajak daerah. Menurut Lisasih dalam Syah, terdapat beberapa kendala dalam pemungutan pajak daerah adalah sebagai berikut :

- a. Realisasi pengawasan peraturan daerah tentang pajak daerah relatif lemah.

Ketentuan UU Nomor 34 Tahun 2000 mengamanatkan bahwa peraturan daerah tentang pajak dan retribusi daerah yang diterbitkan oleh pemerintah daerah harus disampaikan kepada pemerintah pusat, yaitu ke Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan paling lama 15 (lima belas) hari sejak ditetapkan. Akan tetapi, tidak semua provinsi dan kabupaten/kota menyampaikan peraturan daerah ke pemerintah pusat, masih banyak provinsi dan kabupaten/kota yang tidak memperhatikan amanat dalam ketentuan undang-undang tersebut.

Kurangnya kesadaran provinsi maupun kabupaten/kota dalam memenuhi amanat undang-undang tersebut pastinya melemahkan pemungutan pajak daerah, dengan tidak adanya penyampaian peraturan daerah tersebut dapat terjadi kemungkinan terbitnya peraturan daerah yang di kemudian hari ternyata bermasalah karena kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

---

<sup>12</sup>Alviana Anugrah Natsir, “Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Maros”, *Skripsi* (Makassar: Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Hasanuddin Makassar, 2016), h. 30.

b. Sentralisasi kekuasaan pemerintah pusat dalam pengawasan pemungutan pajak daerah

Semua aktivitas pelaksanaan pemerintahan di daerah tetap diperlukan adanya suatu sistem pengawasan dari pemerintah pusat namun pengawasan hendaknya tidak lagi menyisakan celah bagi pemerintah pusat untuk menerapkan sentralisasi kekuasaan yang nantinya dapat menimbulkan konflik antar pusat dan daerah atau antar provinsi dan kabupaten/kota, karena jika demikian makna otonomi daerah menjadi kabur.

Pengawasan oleh pemerintah pusat yang terlalu ketat dapat melemahkan pemungutan pajak dikarenakan dengan adanya pengawasan pemerintah pusat yang terlalu ketat dapat membatasi keleluasan pemerintah dan masyarakat daerah sehingga pemerintah daerah tidak dapat mandiri dalam mengelola aspek kehidupannya sesuai dengan aspirasi, rasa keadilan dan budaya masing-masing.

c. Kurang siapnya daerah dalam menangani sengketa pajak

Permasalahan yang timbul dalam sengketa pajak pada umumnya adalah bagaimana menentukan jenis pajak daerah yang tepat dikenakan (langsung atau tidak langsung), kepada siapa dan di tingkat pemerintahan mana (kabupaten atau kota). Sengketa pajak sebagai sengketa yang timbul dalam bidang perpajakan antara wajib pajak atau penanggung pajak dan pejabat pajak yang berwenang sebagai akibat dikeluarkannya keputusan yang dapat diajukan banding atau gugatan kepada pengadilan pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan, termasuk

gugatan atas pelaksanaan penagihan berdasarkan Undang-Undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa. Adanya sengketa pajak tersebut baik sengketa regulasi, sengketa ketetapan pajak maupun sengketa pelaksanaan penagihan pajak secara otomatis melemahkan pemungutan pajak.

- d. Pemberian perizinan, rekomendasi dan pelaksanaan pelayanan umum yang kurang atau tidak sesuai dengan ruang lingkup tugasnya.
- e. Kurangnya pembinaan terhadap seluruh perangkat dinas.
- f. Kurangnya kemampuan untuk mendengar, menanggapi dan mencari solusi dari keluhan staf, baik yang bertugas sebagai pendata, penganalisis data, perhitungan, penerbitan SKPD, ataupun penagihan.<sup>13</sup>

### **C. Pajak Bumi dan Bangunan**

#### **1. Pengertian Pajak Bumi dan Bangunan**

Pajak bumi dan bangunan adalah pajak atas bumi dan atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Yang dimaksud dengan bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah Kabupaten/kota. Sedangkan yang dimaksud dengan bangunan adalah konstruksi teknik yang

---

<sup>13</sup>Irwan Syah. "Efektivitas dan Kontribusi Pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Semarang". *Skripsi* (Semarang: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Diponegoro, 2014), h. 20-23.

ditanam atau diletakkan secara tetap pada tanah dan perairan pedalaman dan atau laut.<sup>14</sup>

Pengertian pajak bumi dan bangunan menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah pajak atas bumi dan atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.

## **2. Objek Pajak Bumi dan Bangunan**

Objek pajak bumi dan bangunan adalah bumi dan/atau bangunan. Yang dimaksud dengan bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah Indonesia dan tubuh bumi yang ada dibawahnya. Contoh: sawah, lading, kebun, tanah, pekarangan, dan tambang. Sedangkan yang dimaksud Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau diletakkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan termasuk:

- a. Jalan lingkungan yang terletak dalam suatu kompleks bangunan seperti jotel, pabrik, dan emplasemennya dan lain-lain yang merupakan suatu kesatuan dengan kompleks bangunan tersebut.
- b. Jalan tol
- c. Kolam renang
- d. Pagar mewah
- e. Tempat olahraga
- f. Galangan kapal, dermaga

---

<sup>14</sup>Marihot Pahala Sihan. "Pajak Daerah dan Retribusi Daerah" Edisi Revisi, Cet.3. Jakarta: Rajawali Pers, 2013, h. 553.

- g. Taman mewah, dan tempat penampungan/ kilang minyak, air dan gas, pipa minyak dan fasilitas lain yang memberikan manfaat.<sup>15</sup>

### 3. Subjek Pajak Bumi dan Bangunan

Subjek Pajak Bumi dan Bangunan adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan atau memperoleh manfaat atas bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan.<sup>16</sup> Subjek Pajak Bumi dan Bangunan mempunyai kewajiban membayar PBB jika kewajiban pajak objektifnya telah dipenuhi yaitu dengan mempunyai hak atas objek pajak serta menguasai atau memperoleh manfaat dari objek yang dikenakan pajak.

Subjek pajak bukan hanya pemilik melainkan penyewa atau siapa saja yang memanfaatkan tanah atau bangunan karena subjek pajak bumi dan bangunan adalah orang atau badan yang secara nyata:

- a. Mempunyai suatu hak atas bumi, dan atau
- b. Memperoleh manfaat atas bumi, dan atau
- c. Memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan.<sup>17</sup>

Subjek wajib pajak bumi dan bangunan adalah orang atau badan yang secara penuh memiliki hak atas bumi dan atau memperoleh manfaat atas bangunan atau tanah. Wajib pajak bumi dan bangunan berdasarkan UU 12 Tahun 1985 pasal 4, subyek pajak adalah orang atau badan yang secara nyata mempunyai

---

<sup>15</sup>Diana Sari “Konsep Dasar Perpajakan” Bandung: PT. Refika Aditama, 2013, h. 123.

<sup>16</sup>Marihot Pahala Siahhan. “Pajak Daerah dan Retribusi Daerah” h. 559.

<sup>17</sup>Agus Prawoto “*Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.*” (Yogyakarta: BPFE, 2010), h. 10.

suatu hak atas bumi, dan/atau memperoleh manfaat atas bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan.<sup>18</sup>

#### **4. Pengecualian Objek Pajak Bumi dan Bangunan**

Objek pajak yang tidak dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan adalah objek pajak yang :

- a. Digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan.
- b. Digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala, atau yang sejenis dengan itu.
- c. Merupakan hutang lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah pengembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak.
- d. Digunakan oleh perwakilan diplomatik, konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik.
- e. Digunakan oleh badan atau perwakilan organisasi internasional oleh yang ditentukan oleh Menteri Keuangan.<sup>19</sup>

#### **5. Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan**

Menurut Mardiasmo, dasar pengenaan pajak adalah Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP). Nilai Jual Objek Pajak adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi

---

<sup>18</sup>Waluyo "Perpajakan Indonesia 1". (Jakarta: Salemba Empat, 2011), h. 202.

<sup>19</sup>Muhammad Rusjdi, "PBB, BPKTB, & Bea Materai". (edisi kedua, PT. Macanan Jaya Cemerlang, 2008), h. 11.

jual beli, Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau Nilai Jual Objek Pajak pengganti.<sup>20</sup> Dasar pengenaan pajak Bumi dan Bangunan adalah “Nilai Jual Objek Pajak (NJOP)” yang ditetapkan perwilayah berdasarkan keputusan Menteri Keuangan dengan mendengar pertimbangan Bupati serta memperhatikan:

- a. Harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar.
- b. Perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis yang letaknya berdekatan dan fungsinya sama dan telah diketahui harga jualnya.
- c. Nilai perolehan baru.
- d. Penentuan Nilai Jual Objek Pajak Pengganti.<sup>21</sup>

Menurut Mardiasmo dasar perhitungan Pajak Bumi dan Bangunan adalah Nilai Jual Kena Pajak (NJKP), besarnya presentase untuk menentukan besarnya NJKP adalah sebagai berikut:

- a. Sebesar 40% dari Nilai Jual Objek Pajak untuk:
  - 1) Objek pajak perkebunan/Objek pajak kehutanan;
  - 2) Objek pajak lainnya, yang wajib pajaknya perorangan dengan Nilai Jual Objek Pajak atas bumi dan bangunan sama atau lebih dari Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- b. Sebesar 20% dari Nilai Jual Objek Pajak untuk:
  - 1) Objek pajak pertambangan;

---

<sup>20</sup>Mardiasmo, "Perpajakan" Edisi Revisi 2009. Yogyakarta: Andi, 2009), h. 312.

<sup>21</sup>Diana Sari "Konsep Dasar Perpajakan" h. 126.

- 2) Objek pajak lainnya yang Nilai Jual Objek Pajaknya kurang dari Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).<sup>22</sup>

## 6. Tarif Pajak Bumi dan Bangunan

Tarif Pajak Bumi dan Bangunan ditetapkan paling tinggi sebesar 0,3% dan ditetapkan dengan peraturan daerah Kabupaten/Kota. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan keleluasan kepada pemerintah Kabupaten/Kota untuk menetapkan tarif pajak yang dipandang sesuai dengan kondisi masing-masing daerah Kabupaten/Kota. Oleh karena itu, setiap Kabupaten/Kota diberi kewenangan untuk menetapkan besarnya tarif pajak yang mungkin berbeda dengan Kabupaten/Kota lainnya asalkan tidak lebih dari 0,3% (nol koma tiga persen).<sup>23</sup>

Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 11 Tahun 2012 yang tercantum dalam Bab III, Pasal 6 adalah sebagai berikut:

- a. Untuk NJOP sampai dengan Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) ditetapkan sebesar 0,1% pertahun;
- b. Untuk NJOP di atas Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) ditetapkan sebesar 0,2% pertahun.<sup>24</sup>

## 7. Asas Pajak Bumi dan Bangunan

- a. Sederhana

Pajak bumi dan bangunan merupakan suatu reformasi dalam bidang perpajakan. Beberapa jenis pemungutan atau pajak yang

<sup>22</sup>Mardiasmo, "Perpajakan" Edisi Revisi 2009. Yogyakarta: Andi, 2009), h. 318.

<sup>23</sup>Marihot Pahala Sihan. "Pajak Daerah dan Retribusi Daerah" h. 562.

<sup>24</sup>Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

dikenakan terhadap tanah telah dicabut dan diselenggarakan menjadi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

b. Adil

Adil dalam pajak bumi dan bangunan dimaksudkan lebih pada objeknya. Dari objek terbesar hingga terkecil dikenakan pajak bumi dan bangunan sesuai dengan kemampuan wajib pajak.

c. Kepastian dalam hukum

Pajak Bumi dan Bangunan mempunyai kekuatan dan kepastian hukum yang merupakan pedoman bagi masyarakat, atau dengan perkataan lain masyarakat tidak ragu-ragu untuk melaksanakan kewajibannya. Pajak Bumi dan Bangunan diatur dalam Undang-Undang No.12 Tahun 1985 dan didukung oleh peraturan pemerintah, keputusan Menteri Keuangan, dan keputusan Dirjen Pajak.

d. Gotong royong

Asas ini telah tercermin pada semangat keikutsertaan masyarakat dalam mendukung pelaksanaan Undang-Undang PBB. Mulai dari yang mempunyai kemampuan membayar terbesar hingga terkecil sama-sama gotong royong untuk membiayai pembangunan.<sup>25</sup>

## 8. Dasar Hukum Pemungutan

Menurut Marihot, dasar hukum pemungutan PBB Perdesaan dan Perkotaan pada suatu Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut :

---

<sup>25</sup>Asmaul Husna Yusuf Mubar “ Analisis Peranan Pajak Bumi dan Bangunan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Takalar”, *Skripsi* (Makassar: Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin Makassar, 2014), h. 29-30.

- a. Undang-Undang No. 28/2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- b. Peraturan daerah Kabupaten/Kota yang mengatur tentang PBB Perdesaan dan Perkotaan.
- c. Keputusan Bupati/Walikota yang mengatur tentang PBB Perdesaan dan Perkotaan sebagai aturan pelaksanaan peraturan daerah tentang pemungutan PBB Perdesaan dan Perkotaan.<sup>26</sup>

**D. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pajak Bumi dan Bangunan***

Pajak Bumi dan Bangunan pada umumnya memiliki peran yang cukup besar bagi kelangsungan dan kelancaran proses pembangunan. Oleh karena itu perlu ditangani dan dikelola lebih intensif. Namun pada umumnya penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan seringkali terdapat berbagai masalah yang dialami bagi pemerintah daerah. Hal tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor yang sering menjadi kendala dalam mencapai target yang telah ditentukan. Penerimaan pajak Bumi dan Bangunan akan memberikan hasil yang sesuai dengan penetapan target yang telah ditetapkan apabila didukung oleh beberapa faktor dan dengan mekanisme yang baik serta didukung oleh peraturan yang ada.

Faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah luas bangunan, jumlah Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT), dan jumlah objek pajak bumi dan bangunan. Hal tersebut akan dijelaskan dibawah ini.

---

<sup>26</sup>Marihot Pahala Siahaan “*Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*”.( Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), h. 555.

## 1. Luas Bangunan

Bangunan yang dijadikan objek pajak adalah konstruksi teknik yang ditanam atau diletakkan secara tetap pada tanah yang diperuntukkan sebagai tempat tinggal, tempat berusaha atau tempat yang diusahakan. Dalam menentukan klasifikasi bangunan diperhatikan faktor-faktor sebagai berikut:

- a. Bahan yang digunakan
- b. Letak
- c. Kondisi Lingkungan.

## 2. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT)

Pajak Bumi dan Bangunan merupakan pajak dengan sistem pemungutan *official assessment* yang menekankan pihak fiskus yang lebih proaktif dan kooperatif berdasarkan Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) yang diisi oleh Wajib Pajak (WP) atau verifikasi pihak fiskus di lapangan. Pemerintah daerah dibantu oleh setiap Kelurahan untuk mendistribusikan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) sampai ke tangan seluruh wajib pajak. Petugas penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Terutang PBB diberikan waktu satu bulan dalam menyampaikan SPPT ke setiap wajib pajak. Pajak yang terutang harus dilunasi selambat-lambatnya enam bulan sejak tanggal diterimanya SPPT oleh wajib pajak.

Surat Pemberitahuan Pajak Terutang adalah surat yang digunakan oleh pemerintah untuk memberitahukan besarnya pajak yang terutang kepada Wajib Pajak. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang ini diterbitkan berdasarkan Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP). Didalam SPPT juga terdapat beberapa antara

lain: Tahun Pajak yang bersangkutan, Nomor Objek Pajak, Letak Objek Pajak, Alamat Subjek Pajak, Luas Bumi dan Bangunan, NJOP Bumi dan Bangunan, Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP), Tarif Pajak Bumi dan Bangunan, Jumlah total Pajak Bumi dan Bangunan yang harus dibayar Subjek Pajak, Tempat Pembayaran, Tanggal Jatuh Tempo, Tanda Tangan Kepala Kantor, Tanda Terima SPPT yang bersangkutan.

### 3. Objek Pajak Bumi dan Bangunan

Objek pajak bumi dan bangunan adalah bumi dan/atau bangunan. Yang dimaksud dengan bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah Indonesia dan tubuh bumi yang ada dibawahnya. Contoh: sawah, lading, kebun, tanah, pekarangan, dan tambang. Sedangkan yang dimaksud Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau diletakkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan termasuk:

- a. Jalan lingkungan yang terletak dalam suatu kompleks bangunan seperti hotel, pabrik, dan emplasemennya dan lain-lain yang merupakan suatu kesatuan dengan kompleks bangunan tersebut.
- b. Jalan tol
- c. Kolam renang
- d. Pagar mewah
- e. Tempat olahraga
- f. Galangan kapal, dermaga
- g. Taman mewah

- h. Tempat penampungan/ kilang minyak, air dan gas, pipa minyak dan fasilitas lain yang memberikan manfaat.<sup>27</sup>

**E. *Penelitian Terdahulu***

Penelitian terdahulu tentang Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan telah banyak dilakukan oleh banyak peneliti di luar Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar yang menjadi acuan bagi peneliti untuk mengembangkan penelitiannya.



---

<sup>27</sup>Diana Sari “Konsep Dasar Perpajakan” Bandung: PT. Refika Aditama, 2013, h. 123.

**Tabel 1.1 Matriks Penelitian Terdahulu**

No.	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Shita Tiara 2014	Analisis Atribut-Atribut Yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) Terhadap Pendapatan Daerah Di Kota Medan	Metode Analisis data yang digunakan adalah metode statistik deskriptif kuantitatif dan menggunakan Regresi Linier Berganda.	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel jumlah luas lahan dan jumlah luas bangunan bersama-sama mempengaruhi secara signifikan terhadap Pendapatan Daerah. Besarnya menjelaskan luas lahan dan luas bangunan terhadap perubahan Pendapatan Daerah sebesar 98,2% dan sisanya dapat dijelaskan sebesar 1,8% oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian.
2.	Septiany 2011	Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) pada KKP Pratama di Sleman	Metode Analisis data yang digunakan adalah metode statistik deskriptif kuantitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah objek pajak, luas tanah, luas bangunan, jumlah SPPT, pengurangan, dan tunggakan berpengaruh serentak terhadap penerimaan PBB. Namun, secara individu hanya variabel tunggakan berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan PBB, variabel objek pajak mempunyai pengaruh positif terhadap penerimaan PBB, sedangkan untuk variabel luas tanah, luas bangunan, dan jumlah SPPT, pengurangan dan tunggakan berpengaruh negatif terhadap PBB.

No.	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
3.	Stefanus Dandy 2016	Pengaruh Jumlah Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Nilai Jual Objek Pajak, dan Tunggalan Pajak Terhadap Penerimaan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Kulon Progo	Penelitian ini menggunakan analisis regresi linear berganda. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kausal.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial variabel jumlah SPPT, NJOP, dan tunggalan pajak berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak bumi dan bangunan. Pengujian secara simultan menunjukkan bahwa variabel jumlah SPPT, NJOP, dan tunggalan pajak secara bersama-sama berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak bumi dan bangunan.
4.	Witiya Tri Handayani 2013	Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Realisasi Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Pada Kecamatan Jebres	Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis interaktif.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (A) faktor-faktor yang mempengaruhi realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) pada Kecamatan Jebres Kota Surakarta, yaitu: (1) SPPT tidak tersampaikan kepada Wajib Pajak dikarenakan Wajib Pajak tidak berdomisili pada Objek Pajak, pemilik baru tidak mau menerima SPPT atas nama pemilik lama, tanah warisan yang sudah dibagi dan ganti

No.	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
		Kota Surakarta		<p>nama dalam sertifikat tetapi nama dalam PBB belum diganti, tanah warisan yang belum dibagi dan ditempati secara bersama-sama, Wajib Pajak mengontrak atau hanya sementara menempati Objek Pajak, Wajib Pajak tidak dikenal, tanah relokasi, SPPT nama Wajib Pajak No Name (NN), tanah kuburan terbit SPPT, dobel SPPT, kesalahan nama Wajib Pajak pada SPPT, alamat objek pajak tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya. (2) Wajib Pajak lupa membayar PBB karena faktor kesibukan, (3) isu pajak, (4) tingkat pengetahuan, (5) kesadaran rendah dalam membayar PBB, (6) topografi wilayah, (7) data belum dientry, (8) tingkat pendapatan Wajib Pajak.</p>

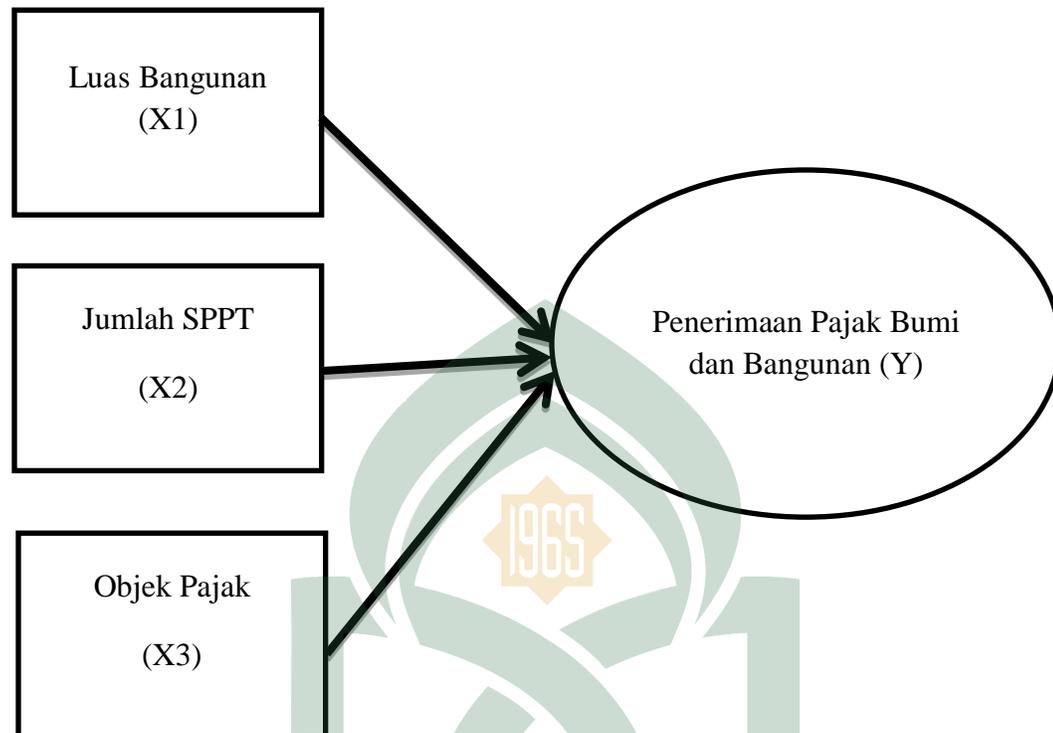
No.	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
5.	Hadi Sasana 2005	Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB), Studi Kasus Di Kabupaten Banyumas	Penelitian ini menggunakan metode analisis regresi linear berganda. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder.	Dari hasil analisis dapat disimpulkan bahwa variabel PDRB per kapita, jumlah wajib pajak, inflasi, jumlah luas lahan, dan jumlah bangunan berpengaruh positif terhadap penerimaan PBB. Variabel PDRB per kapita berpengaruh positif dengan koefisien 0,532; jumlah wajib pajak dengan koefisien 2,231; inflasi dengan koefisien 0,003, jumlah luas lahan dengan koefisien 3,085 dan jumlah bangunan dengan koefisien 3,599. Sedangkan variabel krisis moneter berpengaruh negatif terhadap penerimaan PBB.
6.	Afriyanah 2015	Pengaruh Jumlah Wajib Pajak, Luas Lahan, Jumlah Bangunan, dan Laju Inflasi terhadap Penerimaan Pajak	Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah <i>casual study</i> . Data yang digunakan adalah data sekunder, teknik analisis data yang digunakan adalah analisis	Hasil uji signifikan menunjukkan bahwa variabel jumlah wajib pajak, luas lahan, jumlah bangunan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penerimaan pajak bumi dan bangunan sedangkan variabel laju inflasi tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak bumi dan bangunan. Sedangkan secara simultan variabel jumlah

No.	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
		Bumi dan Bangunan (PBB) Studi Empiris pada Kecamatan-Kecamatan di Kota Tangerang Periode 2010-2013	statistik dan analisis deskriptif.	wajib pajak, luas lahan, jumlah bangunan, dan laju inflasi memiliki pengaruh terhadap penerimaan pajak bumi dan bangunan.

## **F. Kerangka Penelitian**

Dalam pembangunan daerah diperlukan dana yang sangat besar, oleh karena itu, pajak daerah memiliki peran yang sangat vital dalam pembangunan daerah sebagai sumber dana yang dapat memenuhi kebutuhan dana dalam proses pembangunan daerah.

Kabupaten Gowa memiliki banyak potensi yang dapat memberikan kontribusi untuk meningkatkan sumber penerimaan daerah. Salah satunya Pajak Bumi dan Bangunan. Pajak Bumi dan Bangunan merupakan salah satu sumber penerimaan daerah, seiring dengan peningkatan pembiayaan pembangunan ekonomi diharapkan realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan dari tahun ke tahun meningkat pula, sehingga kontribusinya terhadap pendapatan asli daerah pun juga meningkat. Wajarlah apabila pemerintah daerah berusaha mencari cara agar pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan dapat berjalan seefektif mungkin dan ditetapkan berdasarkan potensi yang sebenarnya dengan mempertimbangkan faktor-faktor yang bisa mempengaruhi keberhasilan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan tersebut antara lain yaitu faktor luas bangunan, jumlah Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT), dan objek pajak bumi dan bangunan. Adapun yang menjadi kerangka pemikiran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :



KET :

 = Variabel Independen (X)

 = Variabel Dependen (Y)

**Gambar 2.1 Kerangka Penelitian**

### ***G. Hipotesis Penelitian***

Berdasarkan uraian diatas maka hipotesis yang dikemukakan dalam penelitian ini adalah :

1. Diduga bahwa luas bangunan berpengaruh positif terhadap penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Gowa.
2. Diduga bahwa jumlah Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) berpengaruh positif terhadap penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Gowa.
3. Diduga bahwa objek pajak bumi dan bangunan berpengaruh positif terhadap penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Gowa.



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. Dimana penelitian kuantitatif adalah penelitian berupa angka dan analisis menggunakan statistik.<sup>1</sup> Metode penelitian kuantitatif karena dalam pelaksanaannya meliputi data yang berupa angka, atau data berupa kata-kata atau kalimat yang dikonversi menjadi data yang berbentuk angka. Data yang berupa angka tersebut kemudian diolah dan dianalisis untuk mendapatkan suatu informasi ilmiah dibalik angka-angka tersebut.<sup>2</sup>

#### **B. Lokasi dan Waktu Penelitian**

Penelitian ini dilakukan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gowa. Adapun waktu penelitian yang akan dilaksanakan yaitu kurang lebih 1 bulan meliputi kegiatan pengumpulan data dan literatur, pengolahan data, analisis data, hingga penulisan laporan dalam bentuk skripsi.

---

<sup>1</sup>Sugiyono, “*Metode Penelitian Kuantitatif*”. (Bandung: Alfabeta, 2010).

<sup>2</sup>Nanang Martono, “*Metode Penelitian Kuantitatif. Analisis Isi dan Analisis Data Sekunder*”. Ed.Revisi 2.-Cet.4-(Jakarta: Rajawali Pers, 2014).

### **C. Jenis dan Sumber Data**

#### 1. Jenis Data

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Menurut Kuncoro data sekunder adalah data yang telah dikumpulkan oleh lembaga pengumpul data dan dipublikasikan kepada masyarakat pengguna data.<sup>3</sup>

#### 2. Sumber Data

Sumber data yang akan dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data yang bersumber dari Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gowa, serta literatur-literatur maupun informasi-informasi tertulis baik yang bersumber dari internet maupun dari instansi-instansi terkait yang dapat menunjang berbagai data yang diperlukan dalam penelitian ini.

### **D. Metode Pengumpulan Data**

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data untuk penelitian ini adalah dengan menggunakan cara sebagai berikut:

1. Penelitian Kepustakaan (*library research*), teknik ini dilakukan dengan cara mendapatkan informasi dari teori-teori dengan cara mempelajari serta mengutip dari buku literatur, majalah, jurnal, serta bahan-bahan informasi lainnya yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

---

<sup>3</sup>Mudrajad Kuncoro. “*Metode Riset untuk Bisnis dan Ekonomi*”. ( Jakarta: Erlangga, 2009), h. 148.

## 2. Dokumentasi (*Documentation*)

Dilakukan dengan melakukan pengumpulan data historis atau dokumen-dokumen yang relevan dengan penelitian ini. Metode dokumentasi adalah pengumpulan data dengan jalan melihat, membaca, mempelajari, kemudian mencatat data yang sudah ada hubungannya dengan objek penelitian.

### E. *Metode Analisis Data*

#### 1. **Metode Data Panel**

Data panel merupakan gabungan antara lintas waktu (*time series*) dan data lintas individu (*cross section*), dimana unit *cross section* yang sama diukur pada waktu yang berbeda. Dalam data panel data *cross section* yang sama diobservasi menurut waktu. Jika setiap unit *cross section* memiliki jumlah observasi *time series* yang sama maka disebut sebagai *balanced panel* (total jumlah observasi =  $N \times T$ ), begitupun sebaliknya apabila jumlah observasi berbeda untuk setiap unit *cross section* dan *time series* maka disebut *unbalanced panel*. Penggunaan model regresi data panel dimaksudkan agar dapat menangkap karakteristik antar individu dan antar waktu yang bisa saja berbeda-beda. Analisis data panel digunakan untuk mengamati hubungan antara satu variabel terikat (*dependent variable*) dengan satu atau lebih variabel bebas (*independent variable*).

Menurut Gudjarati, penggunaan data panel mampu memberikan banyak keunggulan secara statistik maupun secara teori ekonomi, antara lain :

- a. Data panel mampu memperhitungkan heterogenitas individu secara eksplisit dengan mengizinkan variabel spesifik individu sehingga membuat data panel dapat digunakan untuk menguji dan membangun model perilaku yang lebih kompleks.
- b. Jika efek spesifik adalah signifikan berkorelasi dengan variabel penjelas lainnya, maka penggunaan data panel akan mengurangi masalah *omitted variables* secara substansial.
- c. Data panel mendasarkan diri pada observasi *cross section* yang berulang-ulang sehingga metode data panel cocok digunakan untuk *study of dynamic adjustment*.
- d. Tingginya jumlah observasi berimplikasi pada data yang lebih informatif, lebih variatif, kolinearitas antar variabel yang semakin berkurang, dan peningkatan derajat kebebasan (*degree of freedom*) sehingga dapat diperoleh hasil estimasi yang lebih efisien.<sup>4</sup>

Selain manfaat yang diperoleh dengan menggunakan data panel, metode ini juga memiliki keterbatasan dalam penggunaannya diantaranya :

- a. Masalah dalam desain dan pengumpulan data. Masalah yang umum dihadapi diantaranya: cakupan (*coverage*), *nonresponse*, kemampuan daya ingat responden (*recall*) , frekuensi wawancara, waktu wawancara, periode referensi, penggunaan batas dan waktu dalam bias sampel.

---

<sup>4</sup>Damodar N Gujarati “ Dasar-Dasar Ekonometrika” (Jakarta: Salemba Empat, 2015).

- b. Distorsi kesalahan pengamatan (*measurement errors*). *Measurement errors* umumnya terjadi karena pertanyaan yang tidak jelas, *memory errors*, respon yang tidak sesuai.
- c. Masalah selektivitas (*selectivity*) yang mencakup hal-hal sebagai berikut :
- 1) *Self-selectivity*: permasalahan yang muncul karena data-data yang dikumpulkan untuk suatu penelitian tidak sepenuhnya dapat menangkap fenomena yang ada.
  - 2) *Nonresponse*: permasalahan yang muncul dalam panel data ketika ada ketidaklengkapan jawaban yang diberikan oleh responden (sampel rumah tangga).
  - 3) *Attrition*: jumlah responden yang cenderung berkurang pada survei lanjutan yang biasanya terjadi karena responden pindah, meninggal dunia atau biaya menemukan responden yang terlalu tinggi.
- d. Dimensi waktu (*time series*) yang pendek. Jenis panel mikro biasanya mencakup data tahunan yang relatif pendek untuk setiap individu.
- e. *Cross section dependence*. Apabila *macro* panel dengan unit analisis Negara atau wilayah dengan deret waktu yang panjang mengabaikan *cross-country dependence* akan mengakibatkan inferensi yang salah (*misleading inference*).

## 2. Estimasi Model Data Panel

Pada dasarnya ada tiga teknik untuk meregresi data panel, yaitu :

### a. Pendekatan Kuadrat Terkecil (*Pooled Least Squares*)

Merupakan teknik yang paling sederhana dengan mengasumsikan bahwa data gabungan yang ada menunjukkan kondisi yang sesungguhnya. Yaitu dengan menggabungkan (*pooled*) seluruh data *time series* dan *cross section* dan kemudian mengestimasi model dengan menggunakan metode *ordinary least square* (OLS). Hasil analisis regresi ini dianggap berlaku pada semua objek dan semua waktu.

Kelemahan asumsi ini adalah ketidaksesuaian model dengan keadaan yang sesungguhnya. Kondisi tiap objek saling berbeda, bahkan satu objek pada suatu waktu akan sangat berbeda pada kondisi objek tersebut pada waktu yang lain.<sup>5</sup>

### b. Pendekatan Efek Tetap (*Fixed Effect Model*)

Model ini dapat menunjukkan perbedaan konstan antar objek, meskipun dengan koefisien regresor yang sama. Model ini juga memperhitungkan kemungkinan bahwa peneliti menghadapi masalah *omitted variables* yang mungkin membawa perubahan pada *intercept time series* atau *cross section*. Model FEM dengan efek tetap maksudnya adalah bahwa satu objek, memiliki konstan yang tetap besarnya untuk berbagai

---

<sup>5</sup>Wing Wahyu Winarno “Analisis Ekonometrika dan Statistika dengan Eviews”, Unit Penerbit dan Percetakan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN, Yogyakarta, 2007), h. 9.14

periode waktu. Demikian pula dengan koefisien regresinya yang besarnya tetap dari waktu ke waktu (*time invariant*)

c. Pendekatan Efek Acak (*Random Effect Model*)

Pendekatan efek random digunakan untuk mengatasi kelemahan metode efek tetap yang menggunakan variabel semu, sehingga model mengalami ketidakpastian. Tanpa menggunakan variabel semu, metode efek random menggunakan residual, yang diduga memiliki hubungan antar waktu dan antar objek. Namun untuk menganalisis dengan metode efek random ada syarat yang harus dipenuhi, yaitu objek data silang harus lebih besar daripada banyaknya koefisien.<sup>6</sup>

### 3. Model Regresi Data Panel

Persamaan Regresi data panel ada 2 macam yaitu *One Way Model* dan *Two Way Model*.

*One Way Model* adalah model satu arah, karena hanya mempertimbangkan efek individu ( $\alpha_i$ ) dalam model. Berikut Persamaannya:

$$Y_{it} = a + \alpha_i + X_{it}\beta + \epsilon_{it} \text{ (model one way data panel)}$$

Dimana:

$\alpha$  = Konstanta

$\beta$  = Vektor berukuran  $P \times 1$  merupakan parameter hasil estimasi

$X_{it}$  = Observasi ke- $i$  dari  $P$  variabel bebas

---

<sup>6</sup> Wing Wahyu Wiarno "Analisis Ekonometrika dan Statistika dengan Eviews", Edisi 4, 2015, h. 9.17.

$\alpha_i$  = Efek individu yang berbeda-beda untuk setiap individu ke-i

$\epsilon_{it}$  = Error regresi seperti halnya pada model regresi klasik.

*Two Way Model* adalah model yang mempertimbangkan efek dari waktu atau memasukkan variabel waktu. Berikut Persamaannya:

Model dari fungsi regresi yang digunakan untuk mengetahui faktor-faktor yang berpengaruh terhadap penerimaan pajak bumi dan bangunan sebagai berikut:

$$PnPBB_{it} = \beta_0 + \beta_1 \text{luasBangunan}_{it} + \beta_2 \text{JmlSPPT}_{it} + \beta_3 \text{JObjP}_{it} + \epsilon_{it} \dots\dots\dots(1)$$

Keterangan :

Pn PBB : Penerimaan PBB

$\beta_1$  : Luas Bangunan

$\beta_2$  : Jumlah SPPT

$\beta_3$  : Jumlah Objek PBB

$\beta_0$  : Konstanta

$\beta_1, \beta_2, \beta_3$  : Koefisien Regresi

$\epsilon_{it}$  : Error Term

#### 4. Asumsi Regresi Data Panel

Metode regresi data panel akan memberikan hasil pendugaan yang bersifat *Best Linear Unbiased Estimation (BLUE)* jika semua asumsi *Gauss Markov* terpenuhi diantaranya adalah *non-autocorrelation*.

*Non-autocorrelation* inilah yang sulit terpenuhi pada saat kita melakukan analisis pada data panel. Sehingga pendugaan parameter tidak lagi bersifat BLUE.

Jika data panel dianalisis dengan pendekatan model-model *time series* seperti fungsi *transfer*, maka ada informasi keragaman dari unit cross section yang diabaikan dalam pemodelan. Salah satu keuntungan dari analisis regresi data panel adalah mempertimbangkan keragaman yang terjadi dalam unit cross section.

## 5. Uji Asumsi Data Panel

### a. Penentuan Model Estimasi

Dalam metode estimasi model regresi dengan menggunakan data panel dapat dilakukan melalui tiga pendekatan antara lain:

#### 1) *Common Effect Model* atau *Pooled Least Square (PLS)*

Merupakan pendekatan model data panel yang paling sederhana karena hanya mengkombinasikan data *time series* dan *cross section*. Pada model ini tidak diperhatikan dimensi waktu maupun individu, sehingga diasumsikan bahwa perilaku data perusahaan sama dalam berbagai kurun waktu. Metode ini bisa menggunakan pendekatan *Ordinary Least Square (OLS)* atau teknik kuadrat terkecil untuk mengestimasi model data panel.

#### 2) *Fixed Effect Model (FEM)*

Model ini mengasumsikan bahwa perbedaan antar individu dapat diakomodasi dari perbedaan intersepnya. Untuk mengestimasi data panel model *Fixed Effects* menggunakan teknik *variable dummy* untuk menangkap perbedaan intersep antar perusahaan, perbedaan intersep bisa

terjadi karena perbedaan budaya kerja, manajerial, dan insentif. Namun demikian sloponya sama antar perusahaan. Model estimasi ini sering juga disebut dengan teknik *Least Squares Dummy Variable* (LSDV).

### 3) *Random Effect Model* (REM)

Model ini akan mengestimasi data panel dimana variabel gangguan mungkin saling berhubungan antar waktu dan antar individu. Pada model *Random Effect* perbedaan intersep diakomodasi oleh error terms masing-masing perusahaan. Keuntungan menggunakan model *Random Effect* yakni menghilangkan heteroskedastisitas. Model ini juga disebut dengan *Error Component Model* (ECM) atau teknik *Generalized Least Square* (GLS).

#### b. *Penentuan Metode Estimasi Regresi Data Panel*

Untuk memilih model yang paling tepat terdapat beberapa pengujian yang dapat dilakukan antara lain :

Untuk memutuskan apakah akan menggunakan *Common Effect Model* (*Pooled Least Square*) atau *fixed effect* atau *random effect* menggunakan uji Hausman. Setelah kita memutuskan untuk menggunakan suatu model tertentu (FEM atau REM), maka kita dapat melakukan serangkaian uji yaitu :

- 1) Uji Chow (*Chow Tes*), yaitu pengujian untuk memilih apakah *model pooled least square* atau *model fixed effect* yang akan dipilih.

Apabila Hasil:

H0: Pilih PLS

H1: Pilih FE

- 2) Uji Hausman (*Hausman Test*) dilakukan untuk menentukan apakah *model fixed effect* atau *random effect* yang akan dipilih.

Apabila Hasil:

H0: Pilih RE

H1: Pilih FE

- 3) Uji Lagrange Multiplier

Uji Lagrange Multiplier (LM) adalah uji untuk mengetahui apakah model Random Effect lebih baik daripada metode Common Effect (OLS) digunakan.

Apabila Hasil:

H0: Pilih PLS

H1: Pilih RE

Setelah melewati pengujian pemilihan model, maka selanjutnya dilakukan pengujian hipotesis berupa uji statistik. Pengujian dilakukan untuk menentukan baik atau tidaknya model melalui uji kesesuaian (*fit of goodness test*) dari model ( $R^2$ ), uji serempak (F test) maupun uji secara parsial (t test). Uji-uji tersebut menentukan diterima atau tidaknya hipotesis nol.

### c. *Pemilihan Model Terbaik*

Pemilihan model regresi data panel yang terbaik dapat dilakukan berdasarkan pertimbangan statistik. Untuk memilih apakah menggunakan *fixed effects* atau

*random effects* dapat dilakukan dengan pengujian terhadap asumsi ada tidaknya korelasi antara regresor dan efek individu. Hal ini dapat dilakukan dengan melakukan uji Hausman. Hipotesis uji Hausman adalah sebagai berikut:

$$H_0 = E(\tau_i | \chi_{it}) = 0 \text{ atau } \textit{random effects} \text{ adalah model yang tepat}$$

$$H_0 = E(\tau_i | \chi_{it}) \neq 0 \text{ atau } \textit{fixed effects} \text{ adalah model yang tepat}$$

Dasar pengambilan keputusan yaitu menolak menggunakan nilai statistik uji Hausman dan dibandingkan dengan nilai statistik Chi Square ( $\chi^2$ ). Statistik uji Hausman dirumuskan dengan:

$$H = (\beta_{REM} - \beta_{FEM})' (M_{FEM} - \beta_{REM})^{-1} (\beta_{REM} - \beta_{FEM}) \sim \chi^2(k)$$

dimana:  $M$  adalah matriks kovarians  $\beta$  dan  $k$  adalah derajat bebas. Jika nilai statistik uji Hausman lebih besar dari  $\chi^2$  maka keputusannya yaitu cukup bukti untuk menolak  $H_0$  sehingga model terbaik yang digunakan adalah *fixed effects* dan demikian juga berlaku sebaliknya.

Model penerimaan pajak bumi dan bangunan akan diestimasi dengan menggunakan metode data panel statis. Tahap pertama yang dilakukan yaitu uji Chow untuk memilih model terbaik antara OLS dan FEM. Uji ini dilakukan dengan membandingkan nilai F-hitung dan F-statistik. Tahap kedua adalah melakukan uji Hausman untuk menentukan model yang terbaik antara *fixed effects model* (FEM) atau *random effects model* (REM). Tahap tiga dilakukan Uji Lagrange Multiplier untuk mengetahui apakah model Random Effect lebih baik daripada metode Common Effect (OLS) digunakan.

## F. Uji Hipotesis

### 1. Uji Statistik

#### a. Uji Simultan (Uji F)

Uji F adalah pengujian yang dilakukan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel independent secara keseluruhan atau bersama-sama terhadap variabel dependen. Untuk itu pengujian hipotesis yang digunakan adalah :

$H_0: \beta_1, \beta_2, \beta_3 = 0$  semua variabel independen tidak mempengaruhi variabel dependen secara bersama-sama.

$H_1: \beta_1, \beta_2, \beta_3 \neq 0$  Semua variabel independen mempengaruhi variabel dependen secara bersama-sama

Pada tingkat signifikansi 5 persen dengan kriteria pengujian yang dilakukan sebagai berikut :

- 1)  $H_0$  diterima dan  $H_1$  ditolak apabila  $f_{hitung} < f_{table}$ , atau jika probabilitas  $f_{hitung} >$  tingkat signifikansi 0,05 maka  $H_0$  ditolak, artinya variabel independen secara serentak atau bersama-sama tidak mempengaruhi variabel yang dijelaskan secara signifikan.
- 2)  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima apabila  $f_{hitung} > f_{table}$ , atau jika probabilitas  $f_{hitung} <$  tingkat signifikansi 0,05 maka  $H_0$  ditolak, artinya variabel independen secara serentak atau bersama-sama mempengaruhi variabel yang dijelaskan secara signifikan.

b. Uji t (uji parsial)

Uji t dilakukan untuk mengetahui pengaruh secara parsial variabel independen terhadap variabel dependen. Signifikansi tersebut dapat diestimasi dengan melihat nilai signifikan, apabila nilai signifikan  $< 0,05$  maka variabel independen secara parsial tidak mempengaruhi variabel dependen.

Jika signifikansi  $> 0,05$ , maka  $H_0$  diterima. Sebaliknya jika signifikansi  $< 0,05$  maka  $H_0$  ditolak.

Hipotesis yang diuji pada uji statistik t adalah sebagai berikut :

1) Luas Bangunan terhadap Pajak Bumi dan Bangunan

$H_0 : \beta_1 < 0$  tidak ada pengaruh luas bangunan dengan pajak bumi dan bangunan.

$H_1 : \beta_1 > 0$  ada pengaruh luas bangunan terhadap pajak bumi dan bangunan.

2) Jumlah Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) terhadap Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan

$H_0 : \beta_2 < 0$  tidak ada pengaruh jumlah SPPT terhadap penerimaan pajak bumi dan bangunan.

$H_2 : \beta_2 > 0$  ada pengaruh jumlah SPPT terhadap penerimaan pajak bumi dan bangunan.

- 3) Jumlah Objek Pajak Bumi dan Bangunan terhadap penerimaan pajak bumi dan bangunan

$H_0 : \beta_3 < 0$  tidak ada pengaruh jumlah objek pajak bumi dan bangunan terhadap penerimaan pajak bumi dan bangunan.

$H_3 : \beta_3 > 0$  ada pengaruh jumlah objek pajak bumi dan bangunan terhadap penerimaan pajak bumi dan bangunan.

Pada tingkat signifikansi 5 persen dengan pengujian yang digunakan adalah sebagai berikut

- 1)  $H_0$  diterima dan  $H_1$  ditolak apabila  $t_{hitung} < t_{table}$  atau jika probabilitas  $t_{hitung} >$  tingkat signifikansi 0,05, artinya adalah salah satu variabel independen tidak mempengaruhi variabel dependen secara signifikan.
- 2)  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima apabila  $t_{hitung} > t_{table}$ , atau jika probabilitas  $t_{hitung} <$  tingkat signifikansi 0,05, artinya adalah salah satu variabel independen mempengaruhi variabel dependen secara signifikan.

c. Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Koefisien determinasi dilambangkan dengan symbol  $R^2$ , merupakan kuadrat dari koefisien korelasi, koefisien ini dapat digunakan untuk menganalisis apakah variabel yang diduga/diramal (Y) dipengaruhi oleh variabel (X) atau seberapa variabel independen (bebas) mempengaruhi variabel dependen (terikat), mempunyai nilai 0-1 dimana nilai yang mendekati 1 berarti

semakin tinggi kemampuan variabel bebas dalam menjelaskan variabel-variabel terikatnya.<sup>7</sup>

## 2. Uji Asumsi Klasik

### a. Uji Normalitas

Uji normalitas adalah untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Penelitian ini untuk menguji normalitas residual menggunakan uji statistik *non-parametrik kolmogrov-smirnov* (K-S), yaitu dengan melihat signifikansinya lebih besar dari 0,05 maka dapat dikatakan mempunyai distribusi normal.

### b. Uji Autokorelasi

Uji ini bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antara variabel independen terhadap variabel dependen. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi autokorelasi yang tinggi diantara variabel independen. Untuk mengukur toleransi terjadi autokorelasi dapat dilihat dari besarnya nilai Durbin Watson pada data statistik yang di uji. Apabila statistik Durbin Watson berkisar diatas 1,55 maka dikatakan tidak terjadi autokorelasi, sebaliknya jika statistik Durbin Watson berkisar dibawah 1,55 maka dikatakan terjadi autokorelasi.

---

<sup>7</sup>Murray R. Spiegel dan Larry J. Stephens. "Statistik", Edisi Ketiga (Jakarta: Erlangga, 2007), h. 253.

c. Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen.

Deteksi tidak adanya multikolinieritas dalam model regresi adalah dilihat dari besaran VIF (*Variance Inflation Factor*) dan *tolerance*. Regresi bebas dari masalah multikolinieritas jika nilai  $VIF < 10$  dan nilai *tolerance*  $> 0,10$ .<sup>8</sup>

d. Uji Heterokedastisitas

Heterokedastisitas adalah keadaan dimana ketidaksamaan varian dari residual untuk semua pengamatan pada model regresi. Uji heterokedastisitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika varians dari dari satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut homokedastisitas. Untuk mendeteksi ada atau tidaknya heterokedastisitas adalah dengan melihat grafik plot antara nilai prediksi variabel terikat dengan residualnya. Dengan dasar analisis sebagai berikut:

- 1) Apabila ada pola tertentu, seperti titik-titik yang membentuk suatu pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit) maka mengindikasikan telah terjadi heterokedastisitas.
- 2) Apabila tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heterokedastisitas.

---

<sup>8</sup>Imam Ghozali, "*Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*". (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Edisi Ketiga, 2009), h. 95.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum Kabupaten Gowa**

##### **1. Kondisi Geografis**

Kabupaten Gowa berada pada 119.3773<sup>o</sup> Bujur Barat dan 120.0317<sup>o</sup> Bujur Timur, 0829342862<sup>o</sup> Lintang Utara dan 5.577305437<sup>o</sup> Lintang Selatan. Kabupaten Gowa adalah salah satu Kabupaten yang berada di Provinsi Sulawesi Selatan yang dimana kabupaten ini termasuk daerah otonom, sebelah Utara berbatasan dengan Kota Makassar dan Kabupaten Maros. Di sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Sinjai, Bulukumba dan Bantaeng. Di sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Takalar dan Jeneponto sedangkan di bagian Baratnya berbatasan dengan Kota Makassar dan Takalar.

##### **2. Wilayah Administratif**

Wilayah administrasi Kabupaten Gowa terdiri dari 18 Kecamatan dan 167 desa/kelurahan dengan luas sekitar 1.883,33 kilometer persegi atau sama dengan 3,01 persen dari luas wilayah Provinsi Sulawesi Selatan. Wilayah Kabupaten Gowa sebagian besar merupakan dataran tinggi yaitu sekitar 72,26 persen. Ada 9 wilayah kecamatan yang merupakan dataran tinggi yaitu: Parangloe, Manuju, Tinggimoncong, Tombolo Pao, Parigi, Bungaya, Bontolempangan, Tompobulu, dan Biringbulu. Dari total luas Kabupaten Gowa 35,30 persen mempunyai kemiringan tanah di atas 40 derajat yaitu pada wilayah kecamatan Parangloe, Tinggimoncong, Bungaya, dan

Tompobulu. Kabupaten Gowa dilalui oleh banyak sungai yang cukup besar yaitu ada 15 sungai. Sungai dengan luas daerah aliran yang terbesar adalah Sungai Jeneberang dengan luas 881 km<sup>2</sup> dengan panjang 90 km.

### 3. Topografi

Dari total luas Kabupaten Gowa 35,30% mempunyai kemiringan tanah di atas 40 derajat, yaitu pada wilayah Kecamatan Parangloe, Tinggimoncong, Bungaya, Bontolempangan dan Tompobulu. Dengan bentuk topografi wilayah yang sebahagian besar berupa dataran tinggi, wilayah Kabupaten Gowa dilalui oleh 15 sungai besar dan kecil yang sangat potensial sebagai sumber tenaga listrik dan untuk pengairan. Salah satu diantaranya adalah sungai terbesar di Sulawesi Selatan adalah sungai Je'neberang dengan luas 881 Km<sup>2</sup> dan panjang 90 Km.

Sungguminasa adalah sebagai Ibukota Kabupaten Gowa. Dan daerah yang memiliki jarak paling jauh dari Ibukota adalah Kecamatan Biringbulu dengan jarak 140 Km dari Ibukota, sedangkan daerah yang memiliki jarak paling dekat dengan Ibukota adalah Kecamatan Pallangga yakni 2,45 Km.

Untuk lebih jelasnya mengenai gambaran umum kecamatan yang ada dalam wilayah Kabupaten Gowa berdasarkan komposisi luas dan jarak dari Sungguminasa sebagai Ibukota Kabupaten Gowa dapat dilihat pada table berikut ini:

**Tabel 4.1** Jumlah Kecamatan di Kabupaten Gowa, dan Jarak dari Ibukota Kecamatan ke Ibukota Kabupaten di Kabupaten Gowa Tahun 2017

No.	Nama Kecamatan	Ibukota Kecamatan	Jarak ke Ibukota Kabupaten (Km)
1.	Bontonompo	Tamallayang	16,00
2.	Bontonompo Selatan	Pabundukang	30,00
3.	Bajeng	Kalebajeng	12,00
4.	Bajeng Barat	Borimatangkasa	15,80
5.	Pallangga	Mangalli	2,45
6.	Barombong	Kanjilo	6,50
7.	Sombaopu	Sungguminasa	0,00
8.	Bontomarannu	Borongloe	9,00
9.	Pattallassang	Pattallassang	13,00
10.	Parangloe	Lanna	27,00
11.	Manuju	Moncongloe	20,00
12.	Tinggimoncong	Malino	59,00
13.	Tombolo Pao	Tamaona	90,00
14.	Parigi	Majannang	70,00
15.	Bungaya	Sapaya	46,00
16.	Bontolempangan	Bontoloe	63,00
17.	Tompobulu	Malakaji	125,00
18.	Biringbulu	Lauwa	140,00

Sumber: Gowa dalam angka 2018

#### 4. Curah Hujan

Kabupaten Gowa merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan yang hanya dikenal mempunyai dua musim, yaitu musim kemarau dan musim hujan. Biasanya musim kemarau dimulai pada bulan juni hingga September, sedangkan musim hujan dimulai pada bulan desember hingga maret.

Curah hujan di Kabupaten Gowa yaitu 237,75 mm dengan suhu 27,125<sup>0</sup>C. curah hujan tertinggi yang dipantau oleh beberapa stasiun/pos pengamatan terjadi pada Bulan Desember yakni mencapai rata-rata 676 mm, sedangkan curah hujan terendah pada Bulan Juli-September yang bisa dikatakan hamper tidak ada hujan.

## 5. Jumlah Penduduk dan Kepadatan Penduduk

### a. Jumlah Penduduk

Penduduk sebagai objek sekaligus subjek pembangunan merupakan aspek utama yang mempunyai peran penting dalam pembangunan. Oleh karena itu, data penduduk suatu wilayah sangat dibutuhkan dalam proses perencanaan pembangunan. Pada tahun 2017 jumlah penduduk di Kabupaten Gowa mencapai 748.200 jiwa. Untuk lebih jelasnya jumlah penduduk Kabupaten Gowa per Kecamatan dapat dilihat pada table berikut:

**Tabel 4.2** Jumlah Penduduk Per-Kecamatan di Kabupaten Gowa tahun 2017

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Penduduk (Jiwa)
1.	Bontonompo	42.110
2.	Bontonompo Selatan	29.882
3.	Bajeng	69.727
4.	Bajeng Barat	25.106
5.	Pallangga	124.484
6.	Barombong	40.262
7.	Sombaopu	168.601
8.	Bontomarannu	35.563
9.	Pattallassang	24.366
10.	Parangloe	18.643
11.	Manuju	15.057
12.	Tinggimoncong	24.065
13.	Tombolo Pao	29.463
14.	Parigi	12.590
15.	Bungaya	16.322
16.	Bontolempangan	12.109
17.	Tompobulu	28.450
18.	Biringbulu	31.400
<b>Total</b>		<b>748.200</b>

Dapat dilihat dari tabel diatas bahwa Kecamatan yang memiliki jumlah penduduk tertinggi adalah Kecamatan Sombaopu dengan jumlah penduduk sebesar 168.601 jiwa. Sedangkan Kecamatan yang memiliki jumlah penduduk terendah adalah Kecamatan Parigi dengan jumlah penduduk sebesar 12.590 jiwa.

b. Kepadatan Penduduk

Laju pertumbuhan penduduk merupakan barometer untuk menghitung besarnya semua kebutuhan yang diperlukan masyarakat, seperti perumahan, sandang, pangan, pendidikan dan sarana penunjang lainnya. Berdasarkan hasil registrasi penduduk, jumlah penduduk Kabupaten Gowa dalam kurun waktu tahun 2016 dan 2017 mengalami peningkatan dengan rata-rata laju pertumbuhan sekitar 1,73%. Berikut tabel perkembangan laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Gowa. Laju pertumbuhan penduduk yang paling signifikan terjadi di Kecamatan Sombaopu yaitu sebesar 3,45%, dimana pada tahun 2016 jumlah penduduk sebesar 162.979 jiwa, sedangkan pada tahun 2017 mengalami peningkatan menjadi 168.601 jiwa.

**Tabel 4.3** Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk di Kabupaten Gowa Tahun 2016-2017

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk		Laju Pertumbuhan Penduduk (%)
		2016	2017	
1.	Bontonompo	41.818	42.110	0,70
2.	Bontonompo Selatan	29.763	29.882	0,40
3.	Bajeng	68.820	69.727	1,32
4.	Bajeng Barat	24.852	25.106	1,02

5.	Pallangga	120.780	124.484	3,07
6.	Barombong	39.503	40.262	1,92
7.	Sombaopu	162.979	168.601	3,45
8.	Bontomarannu	35.014	35.563	1,57
9.	Pattallassang	24.064	24.366	1,25
10.	Parangloe	18.384	18.643	1,41
11.	Manuju	14.959	15.057	0,66
12.	Tinggimoncong	23.850	24.065	0,90
13.	Tombolopao	29.164	29.463	1,03
14.	Parigi	12.697	12.590	(0,84)
15.	Bungaya	16.300	16.322	0,13
16.	Bontolempangan	12.313	12.109	(1,66)
17.	Tompobulu	28.608	28.450	(0,55)
18.	Biringbulu	31.625	31.400	(0,17)
	<b>Total</b>	<b>735.493</b>	<b>748.200</b>	<b>1,73</b>

Sumber: Kabupaten Gowa dalam angka 2018.

## B. Gambaran Umum Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gowa

### 1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

#### a. Tugas Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gowa

Berdasarkan Peraturan Bupati Gowa Nomor 69 Tahun 2016 tentang tugas Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gowa adalah membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang pendapatan daerah berdasarkan kewenangan dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan pedoman yang berlaku untuk kelancaran tugas.

#### b. Fungsi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gowa

- 1) Perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang pendapatan daerah;
- 2) Pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang pendapatan daerah;

- 3) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang pendapatan daerah;
  - 4) Pelaksanaan administrasi badan; dan
  - 5) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait tugas dan fungsinya.
- c. Visi dan Misi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gowa

1) Visi

Visi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gowa tidak dapat lepas dari ruang lingkup Visi Pemerintah Kabupaten Gowa, sebab Badan Pendapatan Daerah merupakan Perangkat Daerah di Bidang Pendapatan dan juga merupakan elemen penting di dalam suksesnya pencapaian Visi Pemerintah Kabupaten Gowa Tahun 2016-2021 yaitu: **“Terwujudnya Masyarakat yang Berkualitas, Mandiri, dan Berdaya Saing dengan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik”**.

Berdasarkan Visi Kabupaten Gowa tersebut maka dirumuskan Visi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2016-2021, yakni : **“Terwujudnya Badan Pendapatan Daerah yang Handal dalam Peningkatan Pendapatan Daerah melalui Tata Kelola Pemerintahan yang Baik”**

2) Misi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gowa

Misi merupakan serangkaian tindakan yang harus dilaksanakan oleh suatu instansi sebagai penjabaran dari visi yang telah ditetapkan. Perwujudan visi tersebut, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gowa perlu merumuskan misi yang ditetapkan sebagai **Misi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2016-2021** sebagai berikut :

- a) Mengoptimalkan penerimaan daerah baik yang bersumber dari pendapatan asli daerah maupun dari pendapatan lainnya.
- b) Mengkoordinir dan mengoptimalkan pelaksanaan pemungutan pendapatan asli daerah.
- c) Meningkatkan upaya intensifikasi dan ekstensifikasi dalam menggali sumber-sumber penerimaan daerah.
- d) Meningkatkan sistem dan prosedur dalam rangka pemberian pelayanan publik dan meningkatkan pengawasan dan pengendalian dalam pengelolaan penerimaan daerah.

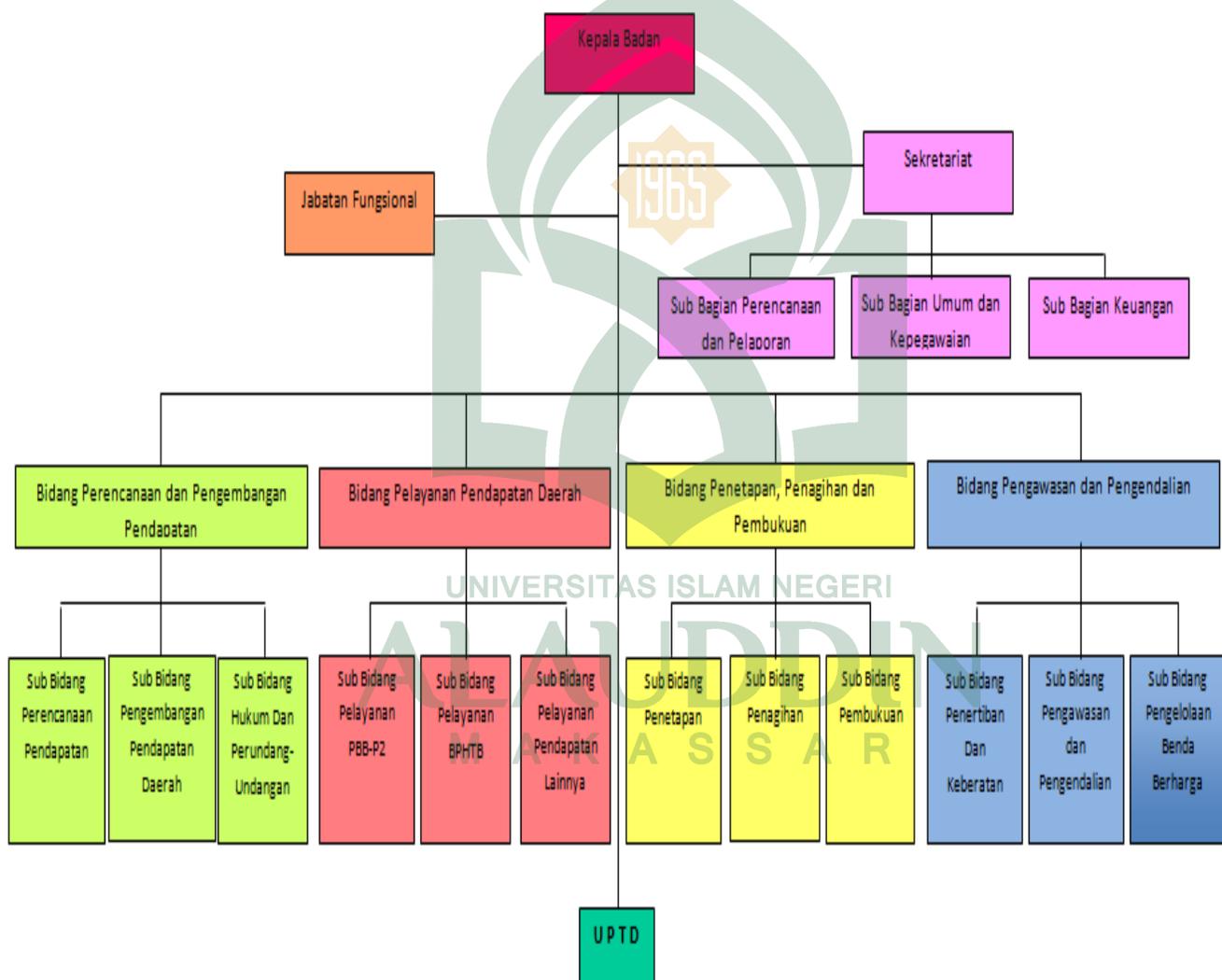
**Gambar 4.1**  
**Struktur Organisasi**  
**Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2016**

Lampiran Peraturan Bupati Gowa

Nomor : 69 Tahun 2016

Tanggal : 23 Desember 2016

**BAGAN STRUKTUR BADAN PENDAPATAN DAERAH**



### C. Perkembangan Variabel Penelitian

#### 1. Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan adalah jumlah Pajak Bumi dan Bangunan yang berkontribusi terhadap penerimaan daerah yang berhasil ditagih oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gowa yang diperoleh setiap tahunnya.

**Tabel 4.4** Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perkecamatan di Kabupaten Gowa

No.	Kecamatan	Target	Realisasi	Selisih
1.	Bontonompo	402.258.695	445.287.194	43.028.499
2.	Bajeng	814.967.982	653.203.032	-161.764.950
3.	Bajeng Barat	245.200.351	219.406.372	-25.793.979
4.	Pallangga	1.208.935.733	1.192.726.847	-16.208.886
5.	Sombaopu	5.490.509.531	4.699.802.321	-790.707.210
6.	Bontomarannu	378.187.963	364.134.972	-14.052.991
7.	Parangloe	573.088.366	529.454.085	-43.634.281
8.	Bungaya	253.253.321	281.380.179	28.126.858
9.	Tompobulu	228.358.491	253.721.657	25.363.166
10.	Tinggimoncong	339.882.994	237.565.093	-102.317.901
11.	Parigi	185.214.143	205.847.392	20.633.249
12.	Tombolo Pao	245.180.603	272.422.892	27.242.289
13.	Biring Bulu	172.337.593	187.608.219	15.270.626
14.	Barombong	264.355.904	275.583.479	11.227.575
15.	Bontonompo Selatan	356.616.257	395.862.299	39.246.042
16.	Bontolempangan	206.779.585	229.755.094	22.975.509
17.	Pattallassang	1.132.707.666	964.089.576	-168.618.090
18.	Manuju	441.937.679	489.249.729	47.312.050
<b>JUMLAH</b>		<b>12.939.772.857</b>	<b>11.897.100.432</b>	<b>1.042.672.425</b>

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gowa, 2017 (*data diolah*)

Tabel 4.4 di atas menunjukkan bahwa Kecamatan Manuju merupakan kecamatan yang paling tinggi dalam hal pencapaian target Pajak Bumi dan Bangunan

dengan tingkat selisih antara target dengan realisasi sebesar 47.312.050, sedangkan kecamatan yang paling rendah dalam hal pencapaian target penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan adalah kecamatan Sombaopu dimana selisih antara target dan realisasi sebesar -790.707.210. Secara keseluruhan dari 18 kecamatan yang ada di Kabupaten Gowa, ada 10 kecamatan yang sudah mencapai target sedangkan masih ada 8 kecamatan yang tidak mencapai target yang telah ditetapkan selama periode tahun 2017.

## 2. Perkembangan Luas Bangunan di Kabupaten Gowa

Bangunan yang dijadikan objek pajak adalah konstruksi teknik yang ditanam atau diletakkan secara tetap pada tanah yang diperuntukkan sebagai tempat tinggal, tempat berusaha atau tempat yang diusahakan.

Berikut data perkembangan luas bangunan setiap kecamatan di Kabupaten Gowa periode tahun 2013-2017.

**Tabel 4.5.** Data perkembangan luas bangunan berdasarkan kecamatan di Kabupaten Gowa periode tahun 2013-2017.

No.	Kecamatan	Perkembangan Luas Bangunan				
		2013	2014	2015	2016	2017
1.	Bontonompo	169,042	169,311	152,282	141,859	145,728
2.	Bajeng	470,648	470,857	455,122	378,339	402,290
3.	Bajeng Barat	143,269	143,326	139,121	129,740	129,369
4.	Pallangga	738,806	742,412	708,875	562,954	591,737
5.	Sombaopu	1,821,825	1,967,252	1,800,273	1,167,882,535	1,646,639
6.	Bontomarannu	182,306	184,392	154,695	145,175	150,827
7.	Parangloe	62,846	62,888	62,451	53,790	57,346
8.	Bungaya	87,017	87,017	86,492	86,528	86,138

9.	Tompobulu	6,490	6,346	6,346	6,571	6,415
10.	Tinggimoncong	173,366	173,640	154,161	146,595	146,158
11.	Parigi	91,245	91,245	91,245	91,245	91,245
12.	Tombolo Pao	15,291	15,291	15,178	15,012	54,737
13.	Biring Bulu	13,026	13,026	12,582	12,582	12,582
14.	Barombong	108,377	108,542	95,195	77,001	83,753
15.	Bontonompo Selatan	99,810	99,726	98,705	97,005	98,766
16.	Bontolempangan	74,172	74,172	71,582	71,359	71,317
17.	Pattallassang	64,297	65,593	62,391	58,968	62,027
18.	Manuju	75,265	75,265	74,009	73,815	73,767

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gowa (*data diolah*)

Berdasarkan tabel 4.5. di atas menunjukkan bahwa luas bangunan setiap kecamatan di Kabupaten Gowa mengalami fluktuasi pada periode 2013-2017. Tidak ada satupun kecamatan yang memiliki peningkatan luas bangunan. Namun ada 1 (satu) kecamatan yang tidak mengalami perubahan luas bangunan yaitu Kecamatan Parigi dimana luas bangunan pada tahun 2013-2017 sama yaitu 91.245.

### **3. Perkembangan Jumlah Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) di Kabupaten Gowa**

Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) merupakan surat yang digunakan Direktorat Jenderal Pajak untuk memberitahukan besarnya pajak terhutang kepada Wajib Pajak. Berikut data perkembangan jumlah SPPT setiap kecamatan di Kabupaten Gowa.

**Tabel 4.6.** Data jumlah Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) berdasarkan kecamatan di Kabupaten Gowa tahun 2013-2017.

No.	Kecamatan	Perkembangan Jumlah SPPT				
		2013	2014	2015	2016	2017
1.	Bontonompo	27,364	27,407	25,947	24,076	24,393
2.	Bajeng	34,560	34,580	33,131	27,430	28,471
3.	Bajeng Barat	14,053	14,068	13,653	12,508	12,260
4.	Pallangga	48,953	49,104	45,643	35,171	36,696
5.	Sombaopu	42,282	45,261	39,004	36,084	34,866
6.	Bontomarannu	16,823	16,924	15,431	12,800	13,486
7.	Parangloe	17,526	17,669	16,873	14,717	16,436
8.	Bungaya	17,537	17,537	17,065	17,069	17,037
9.	Tompobulu	14,436	14,446	14,438	14,419	14,339
10.	Tinggimoncong	18,341	18,399	15,903	14,846	14,587
11.	Parigi	15,061	15,061	15,026	15,004	14,990
12.	Tombolo Pao	15,052	15,053	14,536	14,429	16,913
13.	Biring Bulu	11,689	11,689	11,419	11,366	11,415
14.	Barombong	13,213	13,267	12,121	9,743	10,498
15.	Bontonompo Selatan	18,879	18,884	18,732	16,812	16,842
16.	Bontolempangan	16,232	16,232	15,356	15,269	15,207
17.	Pattallassang	25,950	26,180	24,439	18,047	19,468
18.	Manuju	23,874	23,887	23,561	23,566	23,571

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gowa (*data diolah*)

Berdasarkan tabel 4.6. diatas menunjukkan bahwa jumlah Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) setiap kecamatan di Kabupaten Gowa selalu mengalami fluktuasi. Jumlah SPPT tertinggi pada kecamatan yang ada di Kabupaten Gowa pada periode tahun 2013-2017 adalah kecamatan Pallangga dimana pada tahun 2013 jumlah SPPT sebanyak 48.953, kemudian pada tahun 2014 meningkat 49.104, kemudian mengalami penurunan menjadi 45.643 pada tahun 2015, kemudian pada tahun 2016 mengalami penurunan menjadi 35.171, dan pada tahun 2017 mengalami

peningkatan menjadi 36.696. Dan kecamatan yang memiliki SPPT terendah adalah Kecamatan Biring Bulu dimana pada tahun 2013 jumlah SPPT hanya 11.689 dan pada tahun 2017 sebanyak 11.415.

#### 4. Data Perkembangan Objek Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Gowa

Objek pajak bumi dan bangunan adalah bumi dan/atau bangunan. Yang dimaksud dengan bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah Indonesia dan tubuh bumi yang ada dibawahnya. Sedangkan yang dimaksud Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau diletakkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan.<sup>1</sup> Berikut data Jumlah Objek Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Gowa.

**Tabel 4.7.** Data Jumlah Objek Pajak Bumi dan Bangunan setiap Kecamatan di Kabupaten Gowa tahun 2013-2017

No.	Kecamatan	Perkembangan Jumlah Objek Pajak PBB				
		2013	2014	2015	2016	2017
1.	Bontonompo	28,610	28,764	28,668	28,764	28,976
2.	Bajeng	36,432	36,513	36,470	36,512	36,572
3.	Bajeng Barat	14,849	14,882	14,870	14,879	14,892
4.	Pallangga	51,886	52,650	52,116	52,638	52,908
5.	Sombaopu	45,296	49,225	48,578	49,213	49,919
6.	Bontomarannu	17,778	18,038	17,902	18,035	18,116
7.	Parangloe	18,422	18,814	18,581	18,805	20,101
8.	Bungaya	19,144	19,144	19,144	19,144	19,145
9.	Tompobulu	15,774	15,778	15,774	15,778	15,779

<sup>1</sup>Diana Sari "Konsep Dasar Perpajakan" Bandung: PT. Refika Aditama, 2013, h. 123.

10.	Tinggimoncong	21,180	21,385	21,246	21,385	21,442
11.	Parigi	15,734	15,734	15,734	15,734	15,737
12.	Tombolo Pao	17,081	17,127	17,108	17,127	22,722
13.	Biring Bulu	12,513	12,529	12,515	12,529	12,578
14.	Barombong	13,998	14,127	14,071	14,127	14,195
15.	Bontonompo Selatan	19,565	19,652	19,567	19,652	19,677
16.	Bontolempangan	17,338	17,338	17,338	17,338	17,338
17.	Pattallassang	33,236	33,848	33,477	33,840	34,030
18.	Manuju	24,943	25,020	24,980	25,020	25,044

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gowa (*data diolah*)

Berdasarkan tabel 4.7. diatas menunjukkan bahwa kecamatan yang memiliki objek Pajak PBB paling tinggi adalah Kecamatan Pallangga dimana Pada Tahun 2013 jumlah objek PBB sebesar 51.886, namun jumlah objek PBB di Kecamatan Pallangga mengalami fluktuasi hingga tahun 2017. Sedangkan Kecamatan yang tidak pernah mengalami penurunan jumlah objek pajak PBB selama tahun 2013-2017 adalah Kecamatan Parigi dimana pada tahun 2013-2016 jumlah objek PBB sebesar 15.734 kemudian mengalami peningkatan pada tahun 2017 menjadi 15.737.

#### **D. Hasil Estimasi Model Penelitian**

Salah satu bentuk struktur data yang sering digunakan dalam studi ekonometrika adalah data panel. Data panel adalah data yang berstruktur urut waktu sekaligus *cross section*. Dalam penelitian ini, penulis menguji data penelitian dengan tiga jenis metode estimasi, yaitu model pendekatan kuadrat terkecil (*pooled least square*), pendekatan efek tetap *fixed Effect* dan efek acak *Random effect*. Dalam

penelitian ini faktor-faktor yang di analisis adalah pengaruh luas bangunan, Jumlah SPPT, dan Objek Pajak terhadap Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan.

#### 1. Uji hausman

Statistik uji hausman ini mengikuti distribusi statistik *Chi Square* dengan *degree Of freedom* sebanyak k (jumlah variabel Independen). Jika nilai statistik hausman lebih besar dari nilai kritisnya maka model yang tepat adalah *Random Effect*, sedangkan sebaliknya bila nilai statistik Hausman lebih kecil dari kritisnya maka model yang tepat adalah model *Fixed effect*.

**Tabel 4.8 Uji Hausman  
Hasil Estimasi Model**

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	4.449316	3	0.2169

Hasil pengujian diperoleh *chi-square* 4.449316 dan *P-Value* 0.2169 atau lebih besar dari taraf 1%, 5% dan 10%, maka disimpulkan bahwa hasil estimasi mengikuti model *random effect*. Apabila proses pengolahan data dan model yang dipilih adalah *Random Effect* maka pengujian dapat dikatakan selesai. Disebabkan, metode REM yang menggunakan metode Generalized Least Square (GLS) dapat mengabaikan persoalan pelanggaran uji asumsi klasik (Sedyadi, 2014).<sup>2</sup>

<sup>2</sup> <http://www.sharingid.com/uji-asumsi-klasik-pada-data-panel/>

## 2. Analisis Estimasi dan Hasil pengolahan Data Panel Model *Random Effect*

Dibuat pada model persamaan ekonometrika dengan menggunakan regresi data panel dengan menggunakan pendekatan *Random Effect Model*. Berikut model yang digunakan dalam model pertama ini :

$$PnPBB_{it} = \beta_0 + \beta_1 \text{luasBangunan}_{it} + \beta_2 \text{JmlSPPT}_{it} + \beta_3 \text{JObjP}_{it} + \varepsilon_{it} \dots\dots\dots(1)$$

Keterangan :

Pn PBB : Penerimaan PBB

$\beta_1$  : Luas Bangunan

$\beta_2$  : Jumlah SPPT

$\beta_3$  : Jumlah Objek Pajak PBB

$\beta_0$  : Konstanta

$\beta_1, \beta_2, \beta_3$  : Koefisien Regresi

$\varepsilon_{it}$  : Error Term

**Tabel 4.9**  
**Hasil Estimasi pada Model Random Effect**

Variabel Dependen	Total Obsevasi (90)			
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.998406	0.941555	1.060380	0.2919
X1	0.009570	0.026348	0.363234	0.0173
X2	-0.514116	0.195728	-2.626690	0.0102
X3	2.238748	0.273454	8.186916	0.0000
R-squared	0.876714			

F-statistic	28.29235
-------------	----------

Durbin-Watson stat	1.500912
--------------------	----------

*Sumber : Hasil Pengolahan data dengan Eviews*

Berdasarkan hasil Uji Hausman variabel yang digunakan pada model penelitian ini diestimasi menggunakan *Random Effect* yaitu luas bangunan (X1), jumlah SPPT (X2), dan jumlah objek pajak PBB (X3). Variabel yang mempengaruhi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Gowa pada tahun 2013-2017 adalah bahwa luas bangunan berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak bumi dan bangunan dengan nilai probabilitas  $0.0173 < 0.05$  dan nilai koefisien sebesar 0.009570, artinya jika luas bangunan naik sebesar 1% maka penerimaan pajak bumi dan bangunan akan naik sebesar 0.009570.

Kemudian untuk variabel jumlah SPPT berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penerimaan pajak bumi dan bangunan pada derajat kepercayaan 5% atau 0.05, dengan nilai probabilitas  $0.0102 < 0.05$  dan nilai koefisien -0.514116. Artinya jika jumlah SPPT naik sebesar 1% , maka penerimaan pajak bumi dan bangunan akan menurun sebesar -0.514116. Variabel objek pajak bumi dan bangunan berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak bumi dan bangunan pada derajat kepercayaan 5% atau 0.05, dengan nilai probabilitas  $0.0000 < 0.05$  dan koefisien 2.238748 artinya apabila jumlah objek pajak naik sebesar 1% maka penerimaan pajak bumi dan bangunan akan meningkat sebesar 2.238748.

### 3. Uji Hipotesis

Uji Hipotesis digunakan untuk mengetahui tingkat signifikan dari masing-masing variabel independen secara bersama mampu memberikan penjelasan mengenai variabel dependen.

#### a. Analisis Koefisien Determinasi (Statistik $R^2$ )

Koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui tingkat signifikan masing-masing variabel independen secara bersama mampu memberikan penjelasan mengenai variabel dependen.

**Tabel 4.10**  
**Nilai Koefisien Determinasi pada Model Random Effect**

R-squared	0.876714
Adjusted R-squared	0.899158

Berdasarkan pada tabel 4.11 diatas menjelaskan, untuk mengetahui bahwa  $R^2$  *R-Square* dengan nilai sebesar 0.876714 dengan kata lain seluruh variabel bebas (Luas Bangunan, Jumlah SPPT, dan Objek Pajak) mampu menjelaskan nilai variabel dependen (Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan) sebesar 87%. sedangkan sisanya 13% dijelaskan oleh varibel lain diluar penelitian ini.

b. Uji Simultan (Uji F)

Uji f dilaksanakan untuk mengetahui pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat.

**Tabel 4.11**  
**Hasil Uji Simultan pada Model Random Effect**

<i>F-statistic</i>	<i>Prob (F-statistic)</i>	<b>A</b>
28.2923	0.000000	0.05

Berdasarkan tabel diatas dengan membandingkan P-Value dengan tingkat signifikan sebesar 0.05. dapat disimpulkan bahwa P-Value  $0.000000 < 0.05$  dengan demikian  $H^0$  di tolak dan  $H_a$  diterima dengan artian bahwa variabel bebas secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat.

c. Uji Statistik (Uji T)

Uji T digunakan untuk menguji tingkat signifikan antara variabel bebas dengan variabel terikat secara individu, dengan menggunakan tingkat signifikan 5% atau 0,05. Dikatakan signifikan apabila nilai  $t_{hitung} >$  dari  $t_{tabel}$ .

**Tabel 4.12**  
**Hasil Uji Statistik ( Uji T) pada Model Random Effect**

<i>Variabel</i>	<i>t-statistic</i>	<i>Prob</i>
Luas Bangunan	0.363234	0.0173
Jumlah SPPT	-2.626690	0.0102
Objek Pajak PBB	8.186916	0.0000

Berdasarkan pada tabel 4.13 dengan melihat nilai t-statistic dengan membandingkannya dengan  $t_{tabel}$  . dengan nilai  $t_{tabel}$  pada penelitian ini adalah 1.76131. Maka, dapat disimpulkan bahwa variabel Luas Bangunan berpengaruh

tidak signifikan terhadap variabel terikat Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan dengan nilai t-statistik  $0.363234 < 1.76131$ . Jumlah SPPT tidak signifikan terhadap penerimaan pajak bumi dan bangunan dengan nilai t-statistik  $-2.626690 < t_{\text{-tabel}} 1.76131$ . Sedangkan jumlah objek pajak bumi dan bangunan berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan pajak bumi dan bangunan dengan nilai t-statistik  $8.186916 > 1.76131$ .

#### ***E. Pembahasan Hasil Penelitian***

Dalam menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak bumi dan bangunan di Kabupaten Gowa selama periode 2013-2017 digunakan analisis regresi data panel dengan metode *random effect*. Interpretasi dari hasil penelitian ini sebagai berikut :

##### **1. Pengaruh Luas Bangunan terhadap Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan**

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis yang telah dilakukan menunjukkan bahwa pengaruh luas bangunan terhadap penerimaan pajak bumi dan bangunan berbanding positif dan signifikan. Dengan nilai probabilitas luas bangunan  $0.0173 < 0,05$ . dan nilai koefisien sebesar  $0.009570$ . Hal ini menunjukkan bahwa apabila luas bangunan naik  $0,1\%$  maka penerimaan pajak bumi dan bangunan akan meningkat sebesar  $0.009570$ .

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Hadi Sasana (2005) yang menganalisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Banyumas. Penelitian tersebut menggunakan variabel PDRB

per kapita, jumlah wajib pajak, luas lahan, luas bangunan, dan krisis moneter. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel luas bangunan berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak bumi dan bangunan di Kabupaten Banyumas.

Hasil yang sama pada penelitian yang dilakukan oleh Shita Tiara (2013) tentang Analisis Atribut-Atribut yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) terhadap Pendapatan Daerah di Kota Medan. Penelitian ini menggunakan variabel luas lahan dan luas bangunan. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah luas bangunan berpengaruh secara signifikan terhadap pendapatan daerah di Kota Medan.

## **2. Pengaruh Jumlah Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) terhadap Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan**

Berdasarkan pengujian hipotesis yang dilakukan menunjukkan bahwa pengaruh jumlah SPPT terhadap penerimaan pajak bumi dan bangunan berbanding negatif dan signifikan, dengan nilai probabilitas jumlah SPPT  $0.0102 < 0.05$ , dan nilai koefisien  $-0.514116$ , hal ini menunjukkan bahwa apabila jumlah SPPT meningkat sebesar 0,1% maka penerimaan pajak bumi dan bangunan akan menurun sebesar  $-0.514116$ .

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Elisabeth Tilana Mutiara Putri dengan penelitian yang berjudul Pengaruh Jumlah Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Nilai Jual Objek Pajak, dan Tunggalan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Yogyakarta, dengan hasil penelitian dalam pengujian parsial

untuk variabel Jumlah SPPT menunjukkan nilai signifikansi 0,229, lebih besar daripada alpha 0,05. dengan kata lain variabel Jumlah SPPT tidak memberikan kontribusi terhadap penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan.

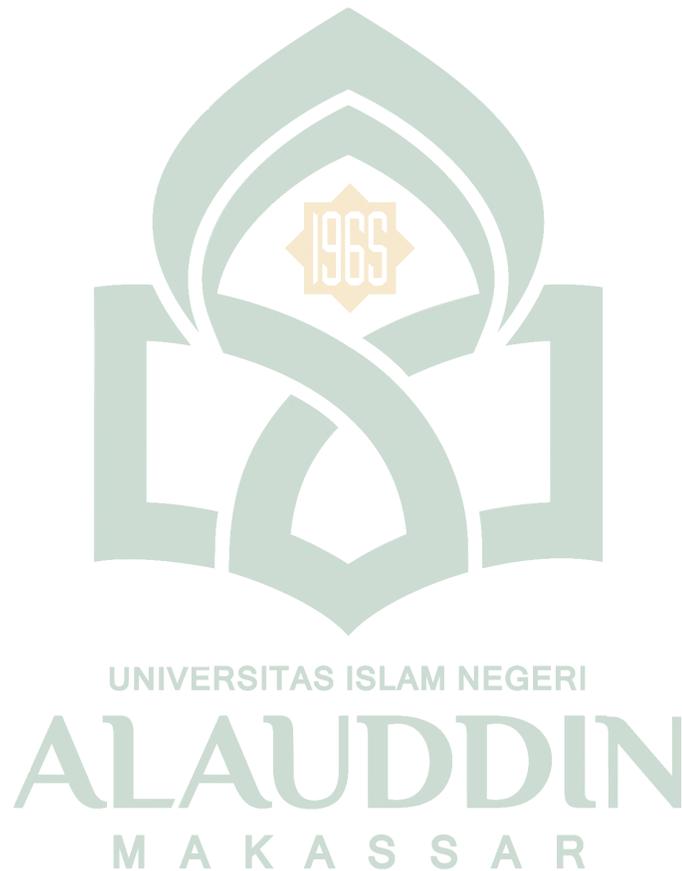
Penelitian lainnya yang dilakukan oleh Septiany (2011) dengan judul “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) pada KPP Pratama di Sleman” menunjukkan bahwa jumlah Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) mempunyai pengaruh negatif terhadap penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

Berdasarkan penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa banyaknya jumlah Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) yang dikeluarkan oleh pemerintah kepada wajib pajak tidak selamanya memberikan kontribusi terhadap penerimaan pajak bumi dan bangunan karena tidak semua wajib pajak yang menerima Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) memenuhi kewajiban perpajakannya.

### **3. Pengaruh Jumlah Objek Pajak Bumi dan Bangunan terhadap Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan**

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis yang telah dilakukan menunjukkan bahwa pengaruh jumlah objek pajak bumi dan bangunan terhadap penerimaan pajak bumi dan bangunan berbanding positif dan signifikan. Dengan nilai probabilitas luas bangunan  $0.0000 < 0,05$  dan nilai koefisien 2.238748. Hal ini menunjukkan bahwa apabila jumlah objek pajak naik 0,1% maka penerimaan pajak bumi dan bangunan akan meningkat sebesar 2.238748.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Septiany (2011) dengan judul “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) pada KPP Pratama di Sleman” menunjukkan bahwa jumlah objek pajak mempunyai pengaruh yang positif terhadap penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).



## BAB V

### PENUTUP

#### A. *Kesimpulan*

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah di uraikan sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Luas bangunan berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak bumi dan bangunan dengan nilai probabilitas  $0.0173 < 0.05$  dan koefisien sebesar 0.009570, artinya jika luas bangunan naik sebesar 1% maka penerimaan pajak bumi dan bangunan akan meningkat sebesar 0.009570.
2. Jumlah SPPT berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penerimaan pajak bumi dan bangunan pada derajat kepercayaan 5% atau 0.05, dengan nilai probabilitas  $0.0102 < 0.05$  dan koefisien -0.514116 artinya jika jumlah SPPT naik sebesar 1% , maka penerimaan pajak bumi dan bangunan akan menurun sebanyak -0.514116.
3. Objek pajak bumi dan bangunan berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak bumi dan bangunan pada derajat kepercayaan 5% atau 0.05, dengan nilai probabilitas  $0.0000 < 0.05$  dan koefisien 2.238748 artinya apabila jumlah objek pajak naik sebesar 1% maka penerimaan pajak bumi dan bangunan akan meningkat dengan nilai koefisien 2.238748.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil analisis dan kesimpulan yang telah dimuat, maka dapat diajukan beberapa saran sebagai berikut :

1. Diharapkan pemerintah Kabupaten Gowa memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak bumi dan bangunan agar realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan dapat tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan.
2. Diharapkan melakukan pengawasan terhadap pemungutan pajak bumi dan bangunan agar tidak terjadi penyelewengan baik dari pihak wajib pajak maupun petugas pemungutan pajak



## DAFTAR PUSTAKA

- Amirullah, Sufyan. “ *Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sulawesi Barat*”. Skripsi. Makassar: Departemen Akuntansi, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Hasanuddin, 2016.
- Anggraeni, Dina. “*Analisis Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah*”.(Studi Empiris pada Propinsi Bengkulu). Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2010.
- Departemen Agama RI. Al-Quran dan Terjemahannya.
- Ghozali, Imam. “*Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*”, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2009.
- Gudjarati, Damodar N “ *Dasar-Dasar Ekonometrika*” (Jakarta: Salemba Empat, 2015).
- Handayani, Witiya Tri “*Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan pada Kecamatan Jebres Kota Surakarta*”. Jurnal Penelitian UNS, Vol 2, No.3, 2014.  
<http://www.sharingid.com/uji-asumsi-klasik-pada-data-panel/>
- Insukindro “Peranan dan Pengelolaan Keuangan Daerah dalam Usaha Peningkatan Pendapatan Asli Daerah.(Yogyakarta: Laporan Penelitian Kursus Keuangan Daerah FE-UGM), 1994.
- Islahuzzaman, “*Dasar-Dasar Akuntansi*”, (Cet. 7, Jakarta: Bumi Aksara, 2011).
- Jamaluddin “*Pengantar Perpajakan*” (Alauddin University Press, cetakan 1), 2011.

- Kuncoro, Mudrajat “*Metode Riset untuk Bisnis dan Ekonomi*”, Jakarta: Erlangga, 2009.
- Mardiasmo “*Perpajakan*”, Edisi Revisi 2006, Yogyakarta: Penerbit Andi, 2006.
- Mardiasmo “*Perpajakan*”, Edisi Revisi 2011, Yogyakarta: Penerbit Andi, 2011.
- Mardiasmo “*Perpajakan*”, Edisi Revisi 2016, Yogyakarta: Penerbit Andi, 2016.
- Martono Nanang, “*Metode Penelitian Kuantitatif. Analisis Isi dan Analisis Data Sekunder*”. Ed.Revisi 2.-Cet.4-(Jakarta: Rajawali Pers), 2014.
- Martoyo, Susilo. “*Sistem Pengadilan Manajemen*”. Yogyakarta: Salemba Empat, 1998.
- Mubar, Asmaul Husna Yusuf “*Analisis Peranan Pajak Bumi dan Bangunan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Takalar*” .Skripsi.Makassar: Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin Makassar, 2014.
- Murray R. Spiegel dan Larry J. Stephens. “*Statistik*”, Edisi Ketiga (Jakarta: Erlangga, 2007).
- Natsir, Alviana Anugrah, “*Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Maros*”, skripsi. Departemen Akuntansi, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Hasanuddin Makassar, 2016.
- Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

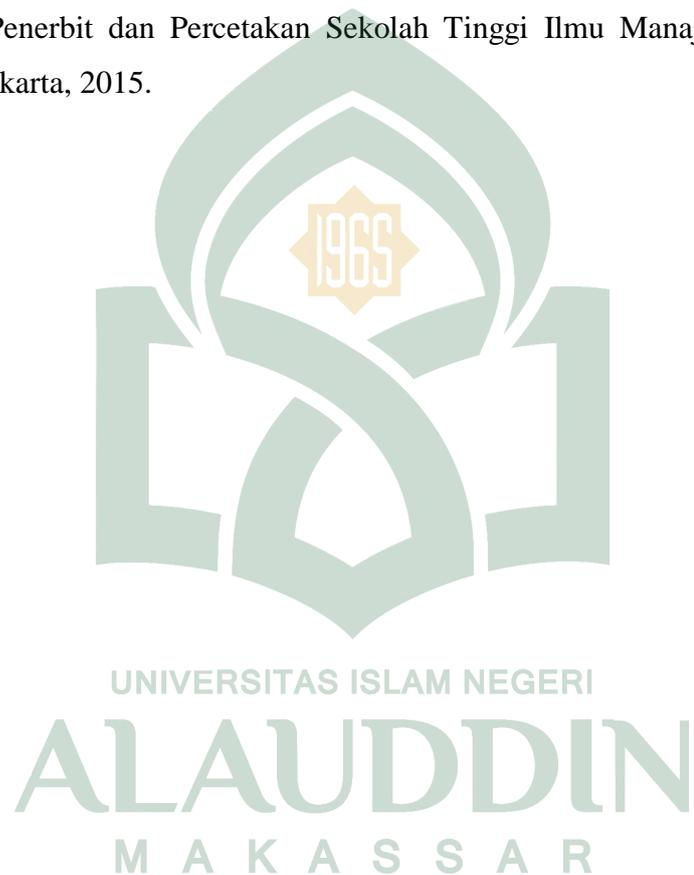
- Prawoto, Agus. "Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan." Yogyakarta: BPF, 2010.
- Rusjdi, Muhammad, "PBB, BPHTB, & Bea Materai". (edisi kedua, PT. Macanan Jaya Cemerlang), 2008.
- Sari, Diana "Konsep Dasar Perpajakan" Bandung: PT. Refika Aditama, 2013.
- Sasana, Hadi "*analisis faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Studi kasus di Kabupaten Banyumas*" jurnal Dinamika Pemabangunan, vol.2 No.1, 2005
- Shiddiq, Muhammad Ash. "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kesadaran Wajib Pajak dalam Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Tangerang selatan".*Skripsi*. Jakarta: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Syarif Hidayatullah, 2011.
- Siahaan, Marihot Pahala "*Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*". Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.
- Siahaan, Marihot Pahala "*Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*" Cetakan 3. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Sugiyono, "*Metode Penelitian Kuantitatif*", Bandung: Alfabeta, 2010.
- Sunarto. "*Pajak dan Retribusi Daerah*". Yogyakarta: AMUS dan Citra Pustaka, 2005.
- Soemitro, Rochmat. "Pajak Bumi dan Bangunan" . Bandung: PT Eresco, 1989.
- Syah, Irwan. "*Efektivitas dan Kontribusi Pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Semarang*".*Skripsi*. Semarang: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Diponegoro, 2014.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah

Waluyo “Perpajakan Indonesia 1”. Jakarta: Salemba Empat, 2011.

Wiarno, Wing Wahyu, “*Analisis Ekonometrika dan Statistika dengan Eviews*”,  
Unit Penerbit dan Percetakan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN,  
Yogyakarta, 2007.

Wiarno, Wing Wahyu, “*Analisis Ekonometrika dan Statistika dengan Eviews*”,  
Unit Penerbit dan Percetakan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN,  
Yogyakarta, 2015.



## HAUSMAN TEST

Correlated Random Effects - Hausman Test

Pool: POOL

Test cross-section random effects

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	4.449316	3	0.2169

Cross-section random effects test comparisons:

Variable	Fixed	Random	Var(Diff.)	Prob.
X1?	-0.006450	0.009570	0.000070	0.0561
X2?	-0.452662	-0.514116	0.003911	0.3258
X3?	2.702828	2.238748	0.278254	0.3790

Cross-section random effects test equation:

Dependent Variable: Y?

Method: Panel Least Squares

Date: 11/01/18 Time: 07:04

Sample: 2013 2017

Included observations: 4

Cross-sections included: 18

Total pool (balanced) observations: 90

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-1.197325	2.670647	-0.448328	0.6553
X1?	-0.006450	0.027650	-0.233276	0.8162
X2?	-0.452662	0.205476	-2.202994	0.0309
X3?	2.702828	0.594164	4.548956	0.0000

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

R-squared	0.971401	Mean dependent var	8.562744
Adjusted R-squared	0.963111	S.D. dependent var	0.360739
S.E. of regression	0.069285	Akaike info criterion	-2.300210
Sum squared resid	0.331229	Schwarz criterion	-1.716921
Log likelihood	124.5094	Hannan-Quinn criter.	-2.064994
F-statistic	117.1830	Durbin-Watson stat	1.861695
Prob(F-statistic)	0.000000		

## RANDOM EFFECT

Dependent Variable: Y?

Method: Pooled EGLS (Cross-section random effects)

Date: 11/01/18 Time: 06:46

Sample: 2013 2017

Included observations: 4

Cross-sections included: 18

Total pool (balanced) observations: 90

Swamy and Arora estimator of component variances

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.998406	0.941555	1.060380	0.2919
X1?	0.009570	0.026348	0.363234	0.0173
X2?	-0.514116	0.195728	-2.626690	0.0102
X3?	2.238748	0.273454	8.186916	0.0000
Random Effects (Cross)				
_BNTNMP--C	-0.209564			
_BJNG--C	-0.148492			
_BJNGBRT--C	0.047859			
_PLNGG--C	-0.221183			
_SMBAOPU--C	0.423349			
_BNTMRNNU--C	0.057310			
_PRGLOE--C	0.210900			
_BNGYA--C	-0.091837			
_TMPBLU--C	0.063212			
_TGGMNCG--C	-0.096868			
_PRGI--C	-0.094090			
_TMLPAO--C	-0.188729			
_BRNGBLU--C	0.068638			
_BRMBNG--C	0.166708			
_BNTNMPSLT--C	0.084726			
_BNTLMPGN--C	-0.092270			
_PTLSSG--C	0.044411			
_MNUJU--C	-0.024080			

### Effects Specification

	S.D.	Rho
Cross-section random	0.164865	0.8499
Idiosyncratic random	0.069285	0.1501

### Weighted Statistics

R-squared	0.876714	Mean dependent var	1.581617
Adjusted R-squared	0.899158	S.D. dependent var	0.096809
S.E. of regression	0.069866	Sum squared resid	0.419794
F-statistic	28.29235	Durbin-Watson stat	1.500912
Prob(F-statistic)	0.000000		

### Unweighted Statistics

R-squared	0.927616	Mean dependent var	8.562744
Sum squared resid	2.807242	Durbin-Watson stat	0.224446



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
M A K A S S A R

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Ahmad Haris, akrab disapa Haris lahir pada tanggal 05 Oktober 1997 di Limbung, Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan. Penulis merupakan anak kedua dari (3) bersaudara dari pasangan Habil dengan Sahariah. Pada tahun 2002 penulis masuk di SD Inpres Po'rong, dan tamat pada tahun 2008. Pada tahun yang sama penulis kemudian melanjutkan pendidikan di jenjang SMP Negeri 2 Manuju dan tamat pada tahun 2011. Dan pada tahun yang sama pula penulis kemudian melanjutkan pendidikan ke jenjang selanjutnya di SMA Negeri 1 Manuju dan tamat pada tahun 2014. Kemudian tetap pada tahun yang sama penulis kemudian melanjutkan pendidikan di bangku kuliah dan masuk di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar (UIN-AM). Kemudian penulis menyelesaikan studinya pada tahun 2018 di jurusan Ilmu Ekonomi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
ALAUDDIN  
M A K A S S A R